



# **PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012**



**PUSAT DATA DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2013**

# **PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012**

**PUSAT DATA DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2013**

## KATA PENGANTAR

Peta Kesehatan Indonesia Tahun 2012 ini disusun untuk menyediakan beberapa data/informasi kesehatan secara garis besar pencapaian program-program kesehatan di Indonesia. Pada edisi ini selain dimunculkan *trend* dalam beberapa tahun terakhir untuk beberapa indikator dan perbandingan peta dari tahun sebelumnya, juga ditampilkan interpretasi setiap gambar yang ditampilkan. Dengan bentuk penyajian ini para pengguna diharapkan dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat.

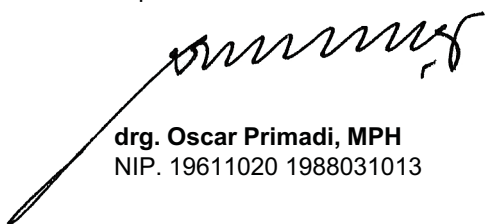
Dalam peta ini digambarkan keadaan kependudukan, situasi lingkungan, derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan menurut provinsi.

Sumber data yang digunakan dalam Peta Kesehatan 2012 ini berasal dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan institusi lain seperti Badan Pusat Statistik (Laporan SDKI 2012), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa data yang tersedia dan bentuk penyajian dalam peta kesehatan ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan kritik, masukan dan saran dari para pengguna demi penyempurnaan Peta Kesehatan di masa mendatang.

Semoga Peta Kesehatan Indonesia Tahun 2012 ini bermanfaat.

Jakarta, September 2013  
Kepala Pusat Data dan Informasi



**drg. Oscar Primadi, MPH**  
NIP. 19611020 1988031013

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PETA INDONESIA .....	v
PETA INDONESIA MENURUT PROVINSI .....	vi
PENENTUAN BATAS PENGELOMPOKKAN .....	vii
CARA MEMBACA GAMBAR .....	viii

## GAMBARAN UMUM

1. Estimasi Persebaran Penduduk Indonesia Tahun 2012 .....	2
2. Estimasi Kepadatan Penduduk di Indonesia (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) Tahun 2012 .....	3
3. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012 .....	4
4. Pencapaian Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat di Indonesia Tahun 2012 .....	5
5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Mimum Layak di Indonesia Tahun 2012 .....	6
6. Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Sanitasi Layak di Indonesia Tahun 2012 .....	7
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011 .....	8
7. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2011 .....	9
8. Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah per Bulan) Tahun 2011 .....	10

## DERAJAT KESEHATAN

1. Angka Kematian Neonatal Periode Tahun 2002 - 2012 .....	12
2. Angka Kematian Bayi Periode Tahun 2002 - 2012 .....	13
3. Angka Kematian Balita Periode Tahun 2002 - 2012 .....	14
5. Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB Paru Tahun 2012 .....	15
6. Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita Tahun 2012 .....	16
7. Annual Parasite Incidence (API) Malaria per 1.000 Penduduk Beresiko Tahun 2012 .....	17
8. Incidence Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	18
9. Angka Penemuan Kasus (CDR) Kusta per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	19

10. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun dan Pria Kawin 15-54 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Tentang Cara Mengurangi Risiko Terkena HIV AIDS (Dengan Menggunakan Kondom Setiap Berhubungan Seks dan Membatasi Dengan Seks Dengan Satu Pasangan) Tahun 2012 .....	20
11. Angka Kesakitan Campak per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	21
12. Jumlah Kasus Baru AIDS Tahun 2012 .....	22

#### UPAYA KESEHATAN

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1) Tahun 2012 .....	24
2. Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4) Tahun 2012 .....	25
3. Cakupan Pemberian 90 Tablet Besi (FE3) Pada Ibu Hamil Tahun 2012 .....	26
4. Cakupan Anak Usia 2 – 4 Tahun yang Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2012 .....	27
5. Cakupan Ibu Bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2012 .....	28
6. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3) Tahun 2012 .....	29
7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2012 .....	30
8. Cakupan Imunisasi Campak pada Bayi Tahun 2012 .....	31
9. Persentase Anak Umum 12-23 Bulan Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012 .....	32
10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 .....	33
11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tahun 2012 .....	34
12. Cakupan Balita ditimbang (D/S) Tahun 2012 .....	35
13. Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2012 .....	36
14. Persentase Pengguna KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2012 .....	37

#### SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Rasio Dokter Umum dan Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	39
2. Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	40
3. Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	41
4. Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	42
5. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	43
6. Rasio Perawat per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	44
7. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012 .....	45

# PETA INDONESIA



Sumber : BAKOSURTANAL

# PETA INDONESIA MENURUT PROVINSI

(Peraturan Mendagri No. 18 Tahun 2005)



## PENENTUAN BATAS PENGELOMPOKAN

Pencapaian nilai indikator kesehatan antar provinsi sangat bervariasi sehingga dalam pemetaannya diperlukan adanya pengelompokan nilai untuk memudahkan dalam penginterpretasian. Pengelompokan atau *“cut of point”* dalam peta ini didasarkan atas kebijakan program-program kesehatan atau nilai tertentu yang mengacu pada metode statistik.

### 1. NILAI PENGELOMPOKAN

Penentuan nilai pengelompokan ada 2 cara yaitu:

- a. Berdasarkan kebijakan program kesehatan (target SPM Bidang Kesehatan, target Rencana Strategis Kesehatan 2010-2014, atau program kesehatan lainnya).
- b. Mengacu pada metode statistik.

Dalam peta ini, pengelompokan nilai terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: sangat baik, baik, kurang dan buruk.

Contoh:

Pengelompokan indikator pencapaian imunisasi campak.

Berdasarkan kebijakan program imunisasi telah ditetapkan bahwa cakupan imunisasi campak dalam suatu wilayah adalah >95%, 90-95%, 85-90%, <85%. Dalam hal ini klasifikasi pada pemetaan dibagi sebagai berikut:

- Kelompok sangat baik bila cakupan imunisasi campak >95 %
- Kelompok baik bila cakupan imunisasi campak 90-95%
- Kelompok kurang bila cakupan imunisasi campak 85-90%
- Kelompok buruk bila cakupan imunisasi campak <85%

### 2. PEWARNAAN DALAM PEMETAAN

Pewarnaan di dalam Peta Kesehatan Indonesia Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:

- Kelompok sangat baik : berwarna hijau tua
- Kelompok baik : berwarna hijau muda
- Kelompok kurang : berwarna kuning
- Kelompok buruk : berwarna merah

Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk beberapa indikator seperti rasio jenis kelamin, rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) dan rata-rata lama hari perawatan (LOS).

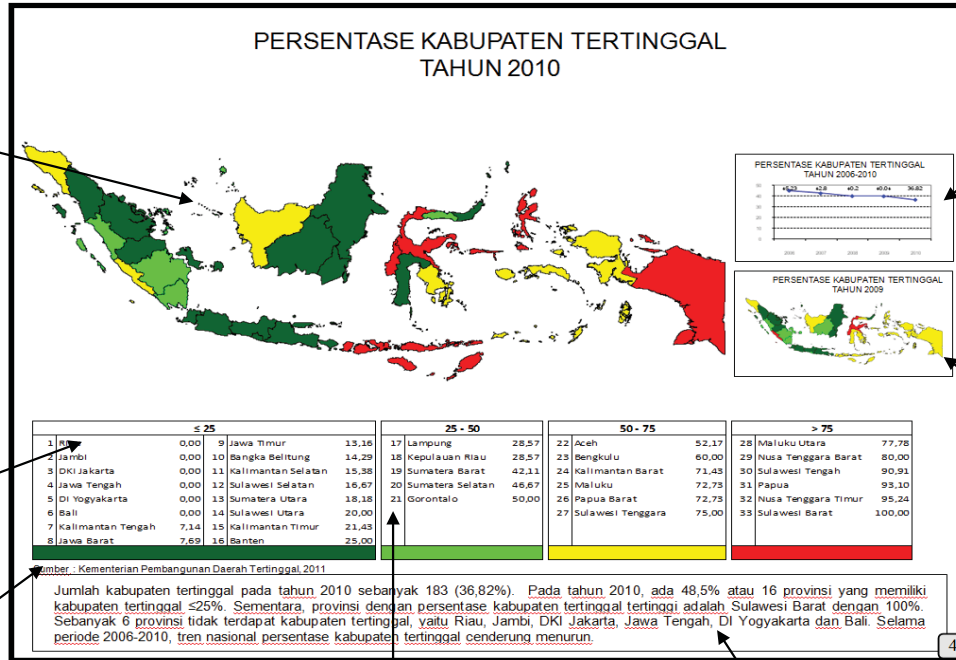


# CARA MEMBACA GAMBAR

PERSENTASE KABUPATEN TERTINGGAL  
TAHUN 2010

Peta utama menggambarkan keadaan terakhir indikator sesuai aturan perbedaan warna

Trend Angka nasional



Tabel data numerik yang merupakan asal data peta utama

Peta yang menggambarkan keadaan tahun sebelumnya sebagai perbandingan

Sumber data

Peringkat, menunjukkan keadaan yang diasumsikan terbaik sampai terburuk

Interpretasi gambar



PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012

---

# GAMBARAN UMUM

# ESTIMASI PERSEBARAN PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2012

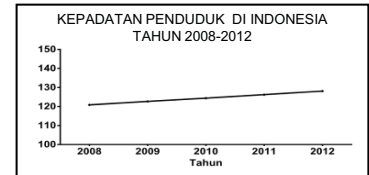
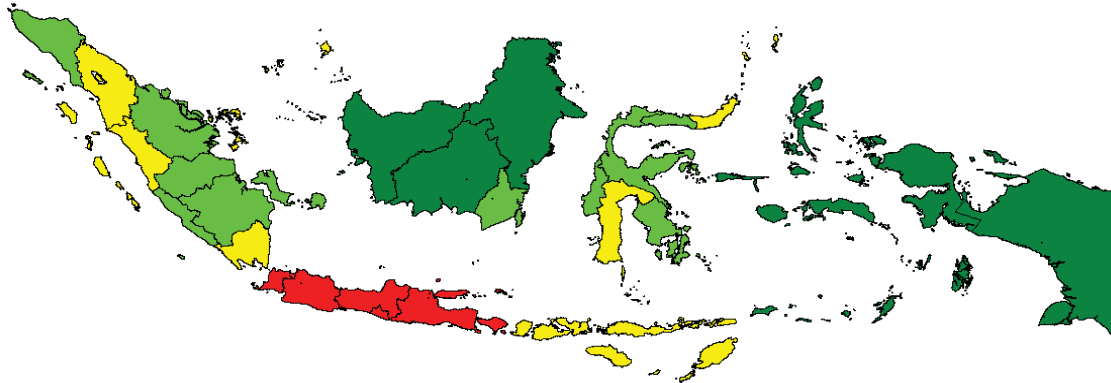


> 10.000.000		6.000.000 - 10.000.000		3.000.000 - 6.000.000		< 3.000.000	
1 Banten	11.219.087	1 Sumatera Selatan	7.720.045	1 Papua	3.143.564	7 Kalimantan Barat	4.471.394
2 Sumatera Utara	13.254.682	2 Lampung	7.789.623	2 Jambi	3.249.012	8 Nusa Tenggara Barat	4.601.030
3 Jawa Tengah	32.586.588	3 Sulawesi Selatan	8.214.779	3 DI Yogyakarta	3.525.870	9 Aceh	4.612.373
4 Jawa Timur	38.006.413	4 DKI Jakarta	9.869.690	4 Kalimantan Selatan	3.768.213	10 Nusa Tenggara Timur	4.874.338
5 Jawa Barat	44.655.786			5 Kalimantan Timur	3.824.809	11 Sumatera Barat	4.972.162
				6 Bali	4.055.360	12 Riau	5.935.430
						1 Papua Barat	816.986
						2 Gorontalo	1.086.506
						3 Maluku Utara	1.088.794
						4 Sulawesi Barat	1.220.234
						5 Kep. Bangka Belitung	1.299.883
						6 Maluku	1.618.789
						7 Bengkulu	1.771.330
						8 Kepulauan Riau	1.847.466
						9 Kalimantan Tengah	2.289.451
						10 Sulawesi Tenggara	2.323.851
						11 Sulawesi Utara	2.326.516
						12 Sulawesi Tengah	2.735.743

Sumber : Pusdatin, Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, 2011

Estimasi penduduk tahun 2012 menggunakan metode geometriks. Metode ini berasumsi bahwa laju/angka pertumbuhan penduduk bersifat konstan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk provinsi. Jumlah penduduk tertinggi di Indonesia hasil estimasi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan jumlah penduduk terendah terdapat di Provinsi Papua Barat. Sembilan provinsi mempunyai penduduk yang tinggi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

# ESTIMASI KEPADATAN PENDUDUK DI INDONESIA (JIWA/KM<sup>2</sup>) TAHUN 2012



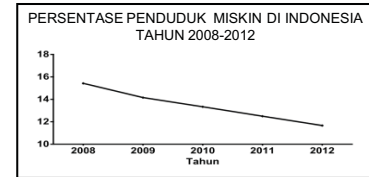
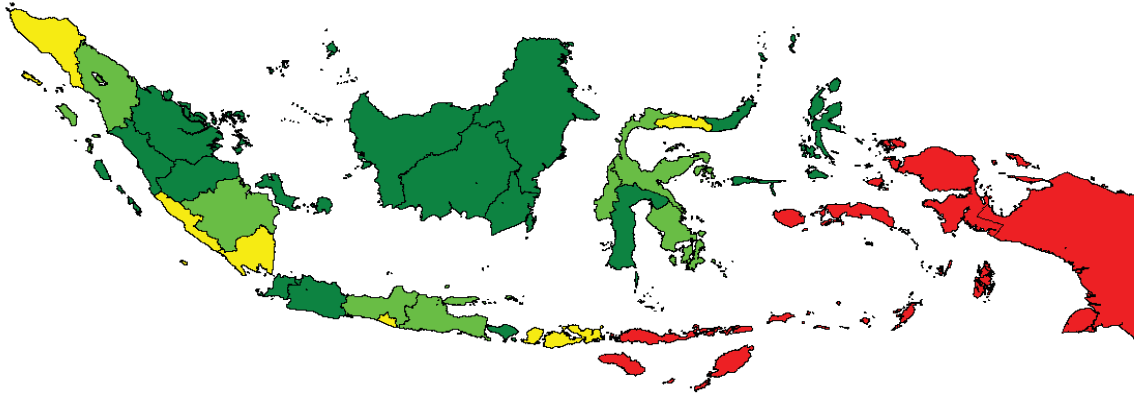
< 40		40 - 100		100 - 500		> 500	
1 Papua Barat 8,42	6 Maluku Utara 34,04	1 Sulawesi Tengah 44,24	7 Aceh 79,58	1 Nusa Tenggara Timur 100,05	6 Lampung 224,98	1 Bali 701,61	6 Jawa Barat 1.262,26
2 Papua 9,85	7 Maluku 34,51	2 Sulawesi Tenggara 61,05	8 Sumatera Selatan 84,29	2 Sumatera Barat 118,35	7 Kepulauan Riau 225,25	2 Jawa Timur 795,12	7 DKI Jakarta 14.863,77
3 Kalimantan Tengah 14,91		3 Jambi 64,90	9 Bengkulu 88,93	3 Sulawesi Utara 167,96	8 Nusa Tenggara Barat 247,74	3 Jawa Tengah 993,47	
4 Kalimantan Timur 18,70		4 Riau 68,20	10 Gorontalo 96,52	4 Sulawesi Selatan 175,84		4 DI Yogyakarta 1.125,34	
5 Kalimantan Barat 30,35		5 Sulawesi Barat 72,69	11 Kalimantan Selatan 97,26	5 Sumatera Utara 181,62		5 Banten 1.161,05	
		6 Kep. Bangka Belitung 79,15					

Sumber : Pusdatin, Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan, 2011

Kemendagri, PP No 66 Tahun 2011

Penyebaran penduduk di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk tiap provinsi yang tidak sama. Provinsi dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 14.863 jiwa per KM<sup>2</sup>. Kepadatan terendah terdapat di Provinsi Papua Barat dengan kepadatan penduduk 8 jiwa per KM<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dan luas wilayah merupakan indikator penting dalam hal penyebaran penduduk.

## PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2012

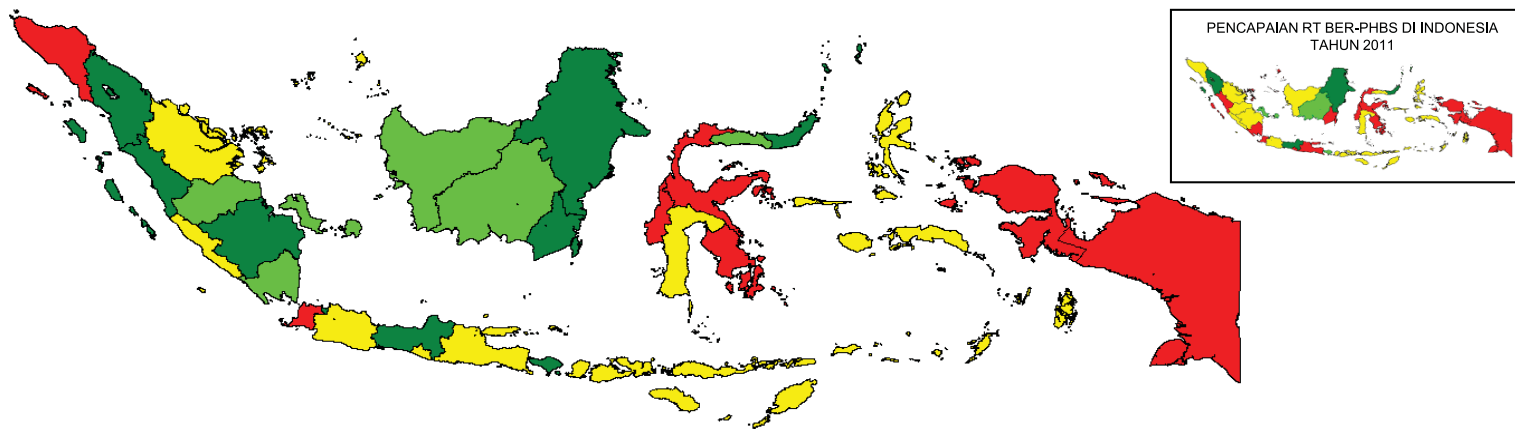


< 10						10 - 15				15 - 20				> 20						
1	DKI Jakarta	3,7	7	Kalimantan Timur	6,4	13	Maluku Utara	8,1	1	Sumatera Utara	10,4	7	Jawa Tengah	14,9	1	Lampung	15,7	1	Nusa Tenggara Timur	20,4
2	Bali	4,0	8	Kepulauan Riau	6,8	14	Jambi	8,3	2	Sulawesi Barat	13,0				2	DI Yogyakarta	15,9	2	Maluku	20,8
3	Kalimantan Selatan	5,0	9	Sulawesi Utara	7,6	15	Sulawesi Selatan	9,8	3	Sulawesi Tenggara	13,1				3	Gorontalo	17,2	3	Papua Barat	27,0
4	Bangka Belitung	5,37	10	Kalimantan Barat	8,0	16	Jawa Barat	9,9	4	Jawa Timur	13,1				4	Bengkulu	17,5	4	Papua	30,7
5	Banten	5,71	11	Sumatera Barat	8,0				5	Sumatera Selatan	13,5				5	Nusa Tenggara Barat	18,0			
6	Kalimantan Tengah	6,19	12	Riau	8,1				6	Sulawesi Tengah	14,9				6	Aceh	18,6			

Sumber : BPS, Susenas 2012, September 2012

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Berdasarkan data persentase penduduk miskin menurut provinsi dari BPS terdapat persebaran penduduk miskin antar provinsi yang nyata perbedaannya. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara mempunyai persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Persentase penduduk miskin terbesar ada di Provinsi Papua.

## PENCAPAIAN RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2012



> 60		50 - 60		40 - 50		< 40					
1 Sumatera Selatan	61,0	7 Kalimantan Selatan	72,6	1 Maluku Utara	41,8	7 Riau	48,8	1 Papua Barat	25,5	7 Sulawesi Tenggara	37,7
2 Sumatera Utara	62,7	8 Kalimantan Timur	75,3	2 Kepulauan Riau	42,9	8 Nusa Tenggara Timur	49,0	2 Papua	25,8		
3 Bali	69,4	9 Jawa Tengah	76,4	3 DI Yogyakarta	43,4	9 Bengkulu	49,2	3 Sulawesi Barat	30,9		
4 Sumatera Barat	69,5			4 Jawa Timur	45,0	10 Sulawesi Selatan	49,3	4 Sulawesi Tengah	30,9		
5 Sulawesi Utara	70,7			5 Kep. Bangka Belitung	55,7	11 Nusa Tenggara Barat	49,8	5 Aceh	33,1		
6 DKI Jakarta	70,9			6 Gorontalo	58,9			6 Banten	35,3		

Sumber : Kemenkes, Pusat Promosi Kesehatan, 2012

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase tertinggi pencapaian rumah tangga ber-PHBS terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 76,4% dan persentase terendah pencapaian rumah tangga ber-PHBS terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 25,5%.

## PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012



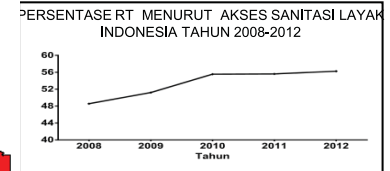
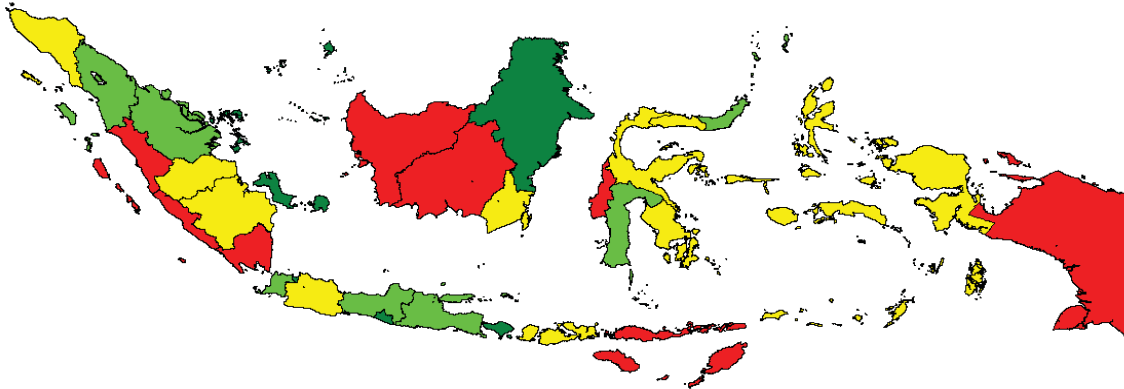
> 50		40 - 50		30 - 40		< 30	
1 Sulawesi Tenggara	51,4	7 DI Yogyakarta	59,4	1 Jawa Barat	30,4	7 Riau	36,2
2 Maluku	51,7	8 Sulawesi Utara	61,4	2 Bengkulu	31,1	8 Gorontalo	36,5
3 Nusa Tenggara Timur	53,3	3 Sumatera Selatan	42,6	9 Bali	49,1	3 Lampung	33,3
4 Kalimantan Barat	53,8	4 Nusa Tenggara Barat	43,8	4 Kalimantan Tengah	34,0	9 Sumatera Utara	38,0
5 Jawa Timur	54,3	5 Jambi	43,9	5 Sumatera Barat	35,4	1 Banten	20,4
6 Jawa Tengah	56,3	6 Sulawesi Tengah	44,5	6 Sulawesi Barat	35,8	2 Kepulauan Riau	22,8
						3 DKI Jakarta	22,9
						4 Papua	23,4
						5 Aceh	25,3
						6 Kep. Bangka Belitung	28,9
						7 Kalimantan Timur	29,8

Sumber : BPS, Susenas 2012

Susenas Triwulan I

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya air untuk minum, mandi dan mencuci. Ketersediaan air minum yang memenuhi syarat semakin sulit dipenuhi, terlebih lagi daerah-daerah resapan air yang telah diubah menjadi pemukiman penduduk, limbah industri yang mencemari sungai-sungai semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan air yang layak untuk diminum. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012 triwulan pertama, persentase Rumah Tangga tertinggi menurut sumber air minum layak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dan persentase Rumah Tangga menurut sumber air minum layak terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur.

# PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT AKSES SANITASI LAYAK DI INDONESIA TAHUN 2012



> 65		55 - 65		45 - 55		< 45	
1 Kalimantan Timur	67,09	1 Jawa Timur	56,14	1 Sulawesi Tengah	45,74	7 Aceh	51,11
2 Kep. Bangka Belitung	67,92	2 Jawa Tengah	58,48	2 Sumatera Selatan	46,65	8 Maluku Utara	51,34
3 Kepulauan Riau	70,36	3 Sumatera Utara	59,43	3 Gorontalo	48,65	9 Sulawesi Tenggara	51,63
4 DKI Jakarta	78,72	4 Banten	62,43	4 Maluku	49,04	10 Nusa Tenggara Barat	51,66
5 DI Yogyakarta	80,37	5 Sulawesi Utara	62,48	5 Papua Barat	49,53	11 Kalimantan Selatan	51,96
6 Bali	87,86	6 Riau	62,58	6 Jambi	50,89	12 Jawa Barat	54,07
						1 Papua	25,92
						7 Bengkulu	44,14
						2 Nusa Tenggara Timur	27,33
						3 Kalimantan Tengah	34,31
						4 Sumatera Barat	43,12
						5 Lampung	43,35
						6 Sulawesi Barat	43,57
						8 Kalimantan Barat	44,39

Sumber : BPS, Susenas 2012

Susenas Triwulan I

Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak menunjukkan semakin bagus tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012 triwulan pertama, persentase rumah tangga yang akses sanitasi layak tertinggi terdapat di Provinsi Bali. Persentase terendah rumah tangga yang akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Papua.



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2011

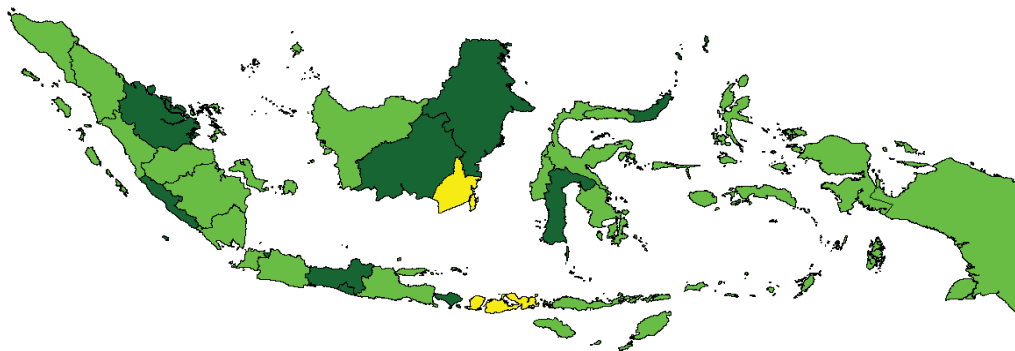


≥ 80	65 - 80												50 - 65	< 50
	1 DKI Jakarta	77,97	8 Sumatera Utara	74,65	15 Bali	72,84	22 Sulawesi Tengah	71,62	29 Papua Barat	69,65				
	2 Sulawesi Utara	76,54	9 Sumatera Barat	74,28	16 Jawa Barat	72,73	23 Banten	70,95	30 Maluku Utara	69,47				
	3 Riau	76,53	10 Sumatera Selatan	73,42	17 Jawa Timur	72,18	24 Gorontalo	70,82	31 Nusa Tenggara Timur	67,75				
	4 DI Yogyakarta	76,32	11 Bengkulu	73,40	18 Aceh	72,16	25 Sulawesi Tenggara	70,55	32 Nusa Tenggara Barat	66,23				
	5 Kalimantan Timur	76,22	12 Kepulauan Bangka Belitung	73,37	19 Sulawesi Selatan	72,14	26 Kalimantan Selatan	70,44	33 Papua	65,36				
	6 Kepulauan Riau	75,78	13 Jambi	73,30	20 Lampung	71,94	27 Sulawesi Barat	70,11						
	7 Kalimantan Tengah	75,06	14 Jawa Tengah	72,94	21 Maluku	71,87	28 Kalimantan Barat	69,66						

Sumber : BPS, 2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dari 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf pada orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta standar kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita. IPM nasional pada tahun 2012 adalah 72,77. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta (77,97). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 65,36%.

# ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) TAHUN 2011

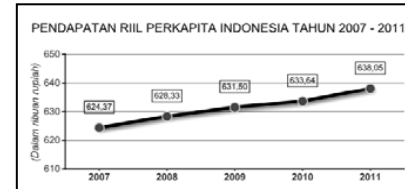
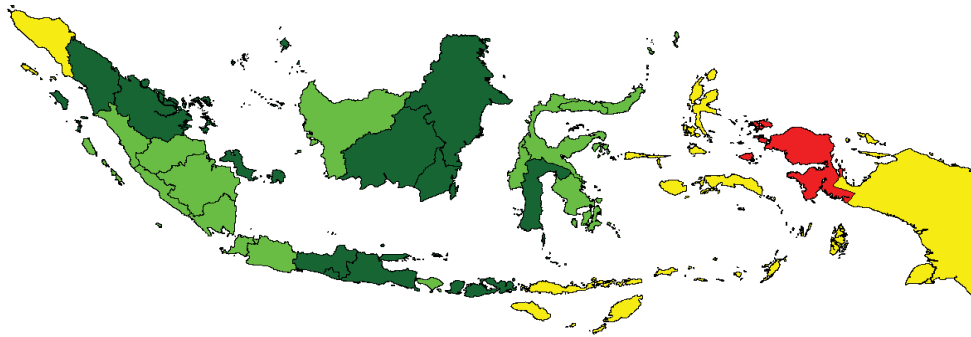


> 70 Tahun				65 - 70 Tahun				60 - 65 Tahun		<60 Tahun								
1	DKI Jakarta	73,35	9	Sulawesi Selatan	70,20	11	Jawa Timur	69,86	19	Papua	68,85	27	Gorontalo	67,11	32	Kalimantan Selatan	64,17	
2	DI Yogyakarta	73,27	10	Bengkulu	70,16	12	Kepulauan Riau	69,85	20	Papua Barat	68,81	28	Sulawesi Tengah	66,86	33	Nusa Tenggara Barat	62,41	
3	Sulawesi Utara	72,33				13	Sumatera Selatan	69,80	21	Aceh	68,80	29	Kalimantan Barat	66,75				
4	Jawa Tengah	71,55				14	Sumatera Barat	69,76	22	Jawa Barat	68,40	30	Maluku Utara	66,31				
5	Riau	71,55				15	Lampung	69,75	23	Sulawesi Barat	68,00	31	Banten	65,05				
6	Kalimantan Timur	71,40				16	Sumatera Utara	69,65	24	Sulawesi Tenggara	68,00							
7	Kalimantan Tengah	71,30				17	Jambi	69,25	25	Nusa Tenggara Timur	67,76							
8	Bali	70,78				18	Kep. Bangka Belitung	69,05	26	Maluku	67,60							

Sumber : BPS, 2013

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat dan juga dapat menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Manusia (IPM). AHH di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 69,65. Provinsi dengan AHH tertinggi adalah Aceh sebesar 73,35, sedangkan AHH terendah terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 62,41.

# PENGELUARAN PERKAPITA (RIBU RUPIAH PER BULAN) TAHUN 2011



> Rp. 640.000		
1	Riau	650,83
2	DI Yogyakarta	650,16
3	Jawa Timur	647,46
4	Kalimantan Timur	646,01
5	Kepulauan Bangka Belitung	645,37
6	Kepulauan Riau	644,96
7	Nusa Tenggara Barat	642,80
8	Kalimantan Tengah	640,73
9	Kalimantan Selatan	640,73
10	Jawa Tengah	640,41
11	Sulawesi Selatan	640,30
12	Sumatera Utara	640,23

Rp. 620.000 - Rp. 640.000					
13	Sulawesi Utara	639,57	18	Sulawesi Barat	635,84
14	Sumatera Barat	638,73	19	Jawa Barat	635,80
15	Bali	637,86	20	Banten	633,64
16	Jambi	637,60	21	Sumatera Selatan	633,57
17	Kalimantan Barat	635,85	22	Sulawesi Tengah	633,31
			23	DKI Jakarta	632,17
			24	Bengkulu	631,86
			25	Gorontalo	626,77
			26	Lampung	621,77
			27	Sulawesi Tenggara	621,44

Rp. 600.000 - Rp. 620.000		
28	Maluku	617,75
29	Aceh	615,60
30	Papua	609,18
31	Nusa Tenggara Timur	607,31
32	Maluku Utara	603,20

< Rp. 600.000		
33	Papua Barat	599,28

Sumber : BPS, 2013

Pada tahun 2011, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp.620.000 – Rp.640.000,-. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi adalah Riau dengan Rp 650.930,-. Sementara provinsi dengan pengeluaran terendah adalah Papua Barat dengan Rp 599.280,-. Bila dilihat tren selama 5 tahun (2008-2011) pengeluaran per kapita cenderung meningkat. Tahun 2011 pengeluaran secara nasional Rp. 638.050,- meningkat dari Rp. 633.640 di tahun 2010.

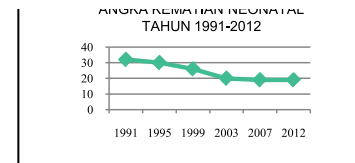
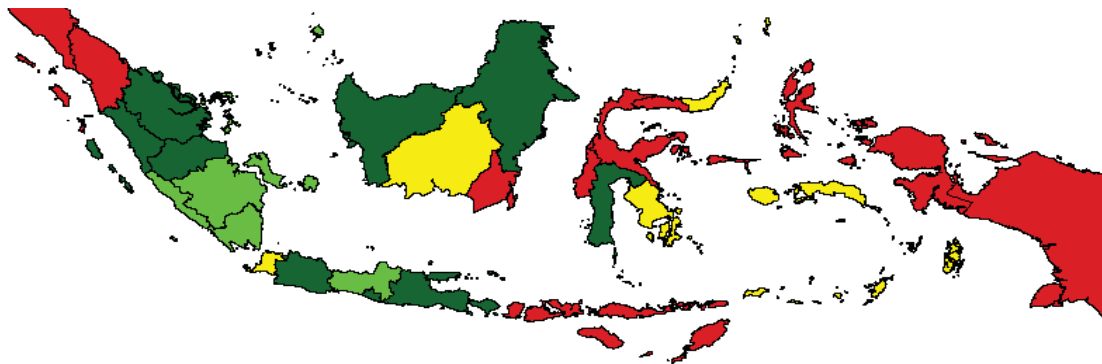


PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012

---

# DERAJAT KESEHATAN

# ANGKA KEMATIAN NEONATAL PERIODE TAHUN 2002 - 2012

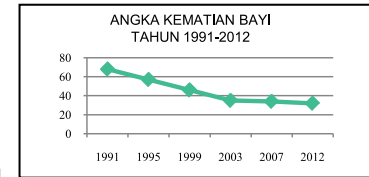
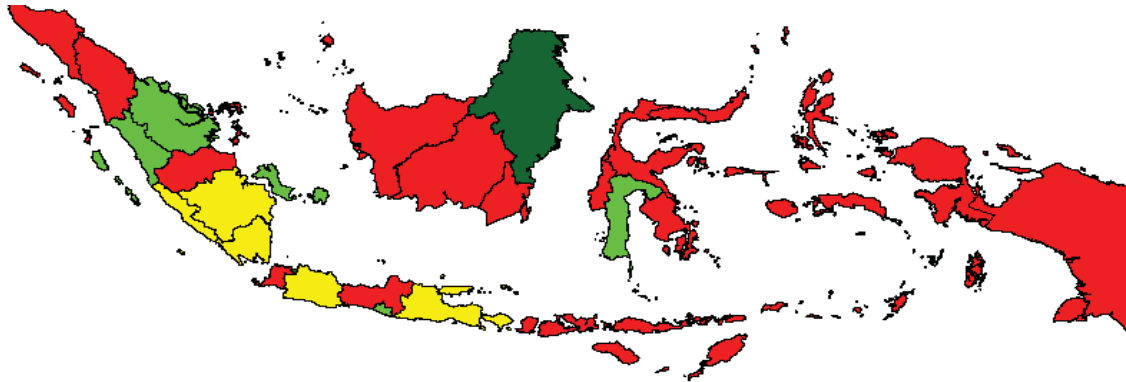


< 19				19 - 22				23 - 25				> 25					
31	Jawa Timur	14	23	DI Yogyakarta	18	17	Jawa Tengah	22	12	Kalimantan Tengah	25	9	Sulawesi Tengah	26	1	Maluku Utara	37
32	Sulawesi Selatan	13	24	Bali	18	18	Bengkulu	21	13	Sulawesi Tenggara	25	10	Gorontalo	26	2	Papua Barat	35
33	Kalimantan Timur	12	25	Kalimantan Barat	18	19	Kepulauan Riau	21	14	Maluku	24	11	Sulawesi Barat	26	3	NTB	33
			26	Sumatera Barat	17	20	Sumatera Selatan	20	15	Banten	23			4	Kalimantan Selatan	30	
			27	Jawa Barat	17	21	Lampung	20	16	Sulawesi Utara	23			5	Aceh	28	
			28	Jambi	16	22	Kep. Babel	20						6	Papua	27	
			29	Riau	15									7	Sumatera Utara	26	
			30	DKI Jakarta	15									8	NTT	26	

Sumber: SDKI 2007, SDKI 2012

Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Indonesia tahun 2012 adalah 19. Provinsi dengan AKN tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 37, sedangkan AKN terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 12.

# ANGKA KEMATIAN BAYI PERIODE TAHUN 2002 - 2012

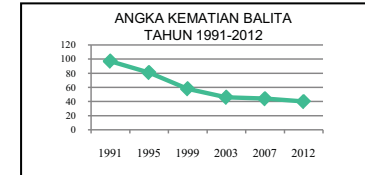
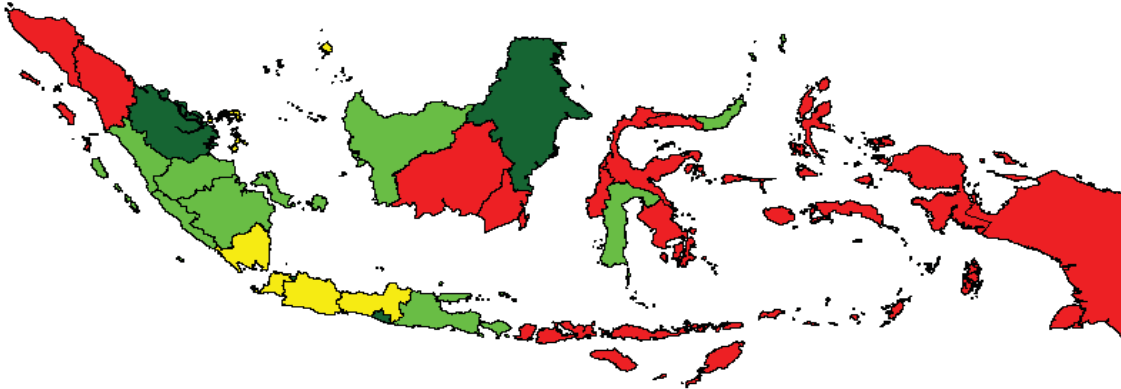


< 23		23 - 27		28 - 30		> 30	
32	DKI Jakarta 22	27	Sumatera Barat 27	21	Lampung 30	17	Sulawesi Utara 33
33	Kalimantan Timur 21	28	Kep. Babel 27	22	Jawa Barat 30	18	Jawa Tengah 32
		29	D.I. Yogyakarta 25	23	Jawa Timur 30	19	Banten 32
		30	Sulawesi Selatan 25	24	Sumatera Selatan 29	20	Kalimantan Barat 31
		31	Riau 24	25	Bengkulu 29		
				26	Bali 29		
						9	Aceh 47
						10	NTT 45
						11	Sulawesi Tenggara 45
						12	Kalimantan Selatan 44
						13	Sumatera Utara 40
						14	Maluku 36
						15	Kepulauan Riau 35
						16	Jambi 34
						1	Papua Barat 74
						2	Gorontalo 67
						3	Maluku Utara 62
						4	Sulawesi Barat 60
						5	Sulawesi Tengah 58
						6	NTB 57
						7	Papua 54
						8	Kalimantan Tengah 49

Sumber: SDKI 2007, SDKI 2012

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB di Indonesia tahun 2012 adalah 34. Provinsi dengan AKB tertinggi adalah Papua Barat sebesar 74, sedangkan AKB terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 21. Target MDG's untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup.

# ANGKA KEMATIAN BALITA PERIODE TAHUN 2002 - 2012

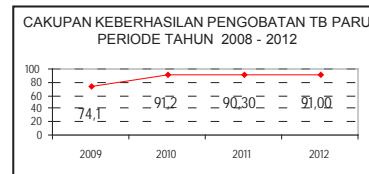
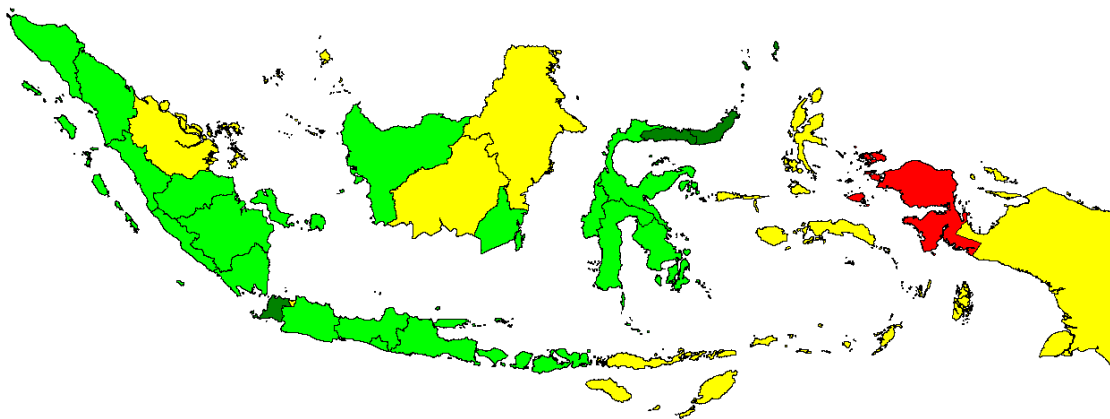


< 32		32 - 37		38 - 42		> 42						
30	DKI Jakarta	31	28 Bali	33	20 Sumatera Selatan	37	16 Lampung	38	9 Nusa Tenggara Timur	58	1 Papua	115
31	Kalimantan Timur	31	29 Kep. Bangka Belitung	32	21 Kalimantan Barat	37	17 Jawa Barat	38	10 Kalimantan Selatan	57	2 Papua Barat	109
32	DI Yogyakarta	30			22 Sulawesi Utara	37	18 Jawa Tengah	38	11 Kalimantan Tengah	56	3 Sulawesi Tengah	85
33	Riau	28			23 Sulawesi Selatan	37	19 Banten	38	12 Sulawesi Tenggara	55	4 Maluku Utara	85
					24 Jambi	36			13 Sumatera Utara	54	5 Gorontalo	78
					25 Bengkulu	35			14 Aceh	52	6 Nusa Tenggara Barat	75
					26 Sumatera Barat	34			15 Kepulauan Riau	42	7 Sulawesi Barat	70
					27 Jawa Timur	34					8 Maluku	60

Sumber: SDKI 2007, SDKI 2012

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Target MDG's untuk indikator AKABA di Indonesia sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Provinsi dengan AKABA tertinggi adalah Papua sebesar 115, sedangkan AKABA terendah terdapat di Provinsi Riau sebesar 28.

# CAKUPAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PARU TAHUN 2012



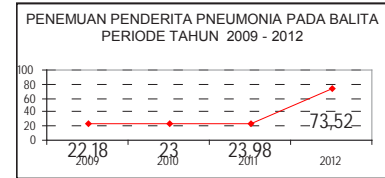
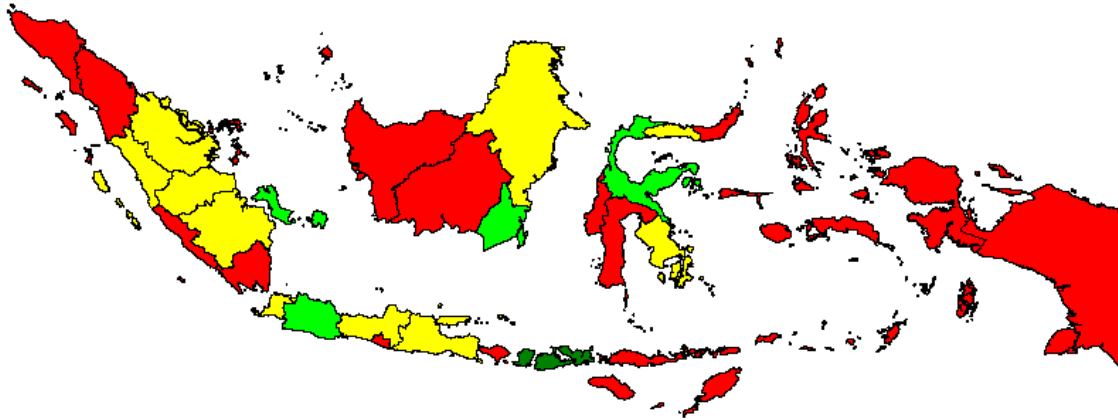
> 95%			85% - 95%					75% - 85%			> 75%						
1	Banten	98,35	4	Kalimantan Barat	95,33	12	Kalimantan Selatan	92,16	20	Jawa Tengah	87,07	28	Maluku Utara	80,63	33	Papua Barat	43,69
2	Gorontalo	96,59	5	Sumatera Selatan	94,91	13	Jawa Barat	92,03	21	Sumatera Barat	87,05	29	Maluku	80,15			
3	Sulawesi Utara	95,37	6	Sumatera Utara	94,84	14	Sulawesi Tengah	91,88	22	DI Yogyakarta	86,77	30	NTT	78,43			
			7	Bengkulu	94,31	15	Jawa Timur	90,70	23	Bali	86,10	31	Kepulauan Riau	77,84			
			8	Aceh	94,24	16	Nusa Tenggara Barat	90,29	24	Kalimantan Timur	84,55	32	Papua	76,01			
			9	Sulawesi Tenggara	93,56	17	Sulawesi Barat	89,95	25	Riau	81,73						
			10	Lampung	93,44	18	Sulawesi Selatan	89,02	26	DKI Jakarta	81,62						
			11	Jambi	92,46	19	Kep. Bangka Belitung	87,84	27	Kalimantan Tengah	81,24						

Sumber: Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Cakupan keberhasilan pengobatan TB Paru (*Success Rate/SR*) merupakan jumlah dari persentase pasien sembuh dan persentase pasien yang mendapatkan pengobatan lengkap. SR TB pada tahun 2012 sebesar 90,20%. Angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 90,30%. Sebanyak 27 provinsi telah mencapai target SR TB sebesar 85%. Terdapat 6 provinsi yang belum mencapai target.



# PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA TAHUN 2012

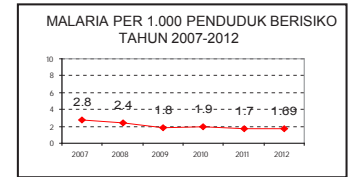
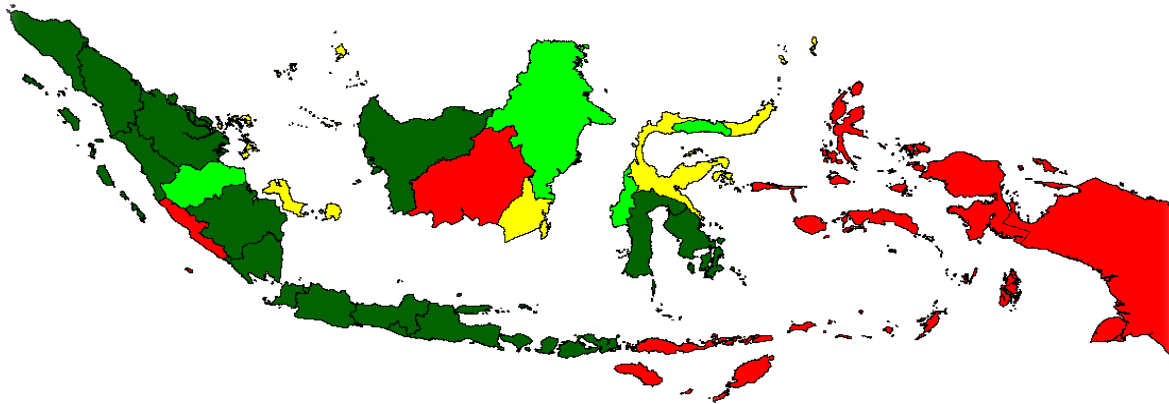


>45%		30%-45%		15%-30%		<15%														
1	NTB	59,24	2	Jawa Barat	43,16	6	Sumatera Selatan	29,49	13	Sumatera Barat	18,89	17	Sulawesi Barat	13,60	24	Sulawesi Selatan	8,68	31	Kalimantan Tengah	1,75
3	Kep.Bangka Belitung	40,34	7	Dki Jakarta	27,92	14	Riau	18,33	18	Sumatera Utara	13,19	25	Lampung	8,57	32	Papua Barat	0,00	32	Papua Barat	0,00
4	Kalimantan Selatan	37,92	8	Gorontalo	24,17	15	Jawa Timur	16,51	19	Bali	12,65	26	Kalimantan Barat	8,31	33	Papua	0,00	33	Papua	0,00
5	Sulawesi Tengah	30,87	9	Jawa Tengah	23,50	16	Sulawesi Tenggara	16,24	20	Maluku Utara	11,25	27	Bengkulu	7,75						
			10	Banten	22,58				21	D I Yogyakarta	10,69	28	Maluku	7,18						
			11	Jambi	19,45				22	NTT	10,58	29	Sulawesi Utara	4,19						
			12	Kalimantan Timur	19,34				23	Kepulauan Riau	10,55	30	Aceh	3,84						

Sumber: Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli). Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Sejak tahun 2007 sampai 2011, angka cakupan penemuan pneumonia Balita berkisar antara 23 – 28% selama kurun waktu tersebut cakupan pneumonia tidak pernah mencapai target nasional. Cakupan nasional penemuan pneumonia pada balita pada tahun 2012 sebesar 23,42%. Provinsi dengan cakupan pneumonia tertinggi adalah NTB sebesar 59,24 sedangkan cakupan terendah terdapat di Papua dan Papua Barat sebesar 0%.

# ANNUAL PARASITE INCIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO TAHUN 2012

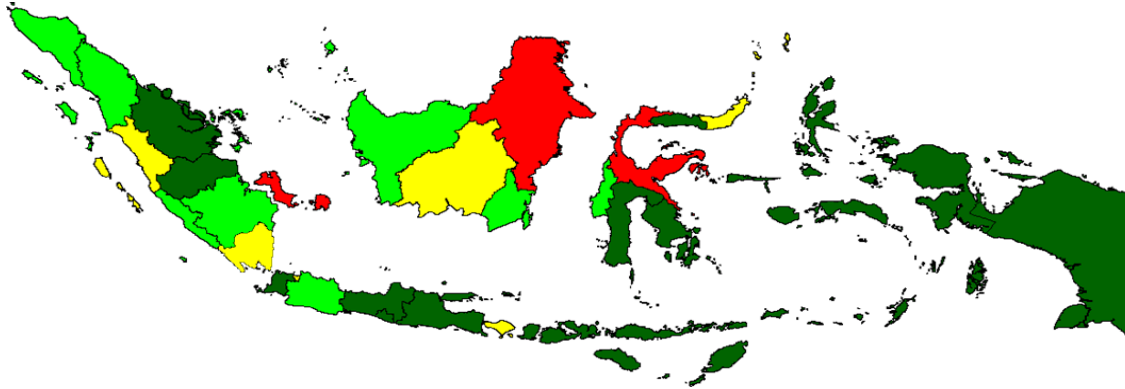


< 1				1 - 2		2 - 3		> 3			
DKI Jakarta	0.00	DI Yogyakarta	0.06	Aceh	0.44	Kalimantan Timur	1.15	Kalimantan Selatan	2.06	Kalimantan Tengah	3.48
Bali	0.00	Lampung	0.18	Sulawesi Tenggara	0.79	Sulawesi Barat	1.23	Sulawesi Utara	2.35	Maluku Utara	5.08
Jawa Barat	0.01	Sulawesi Selatan	0.19	Nusa Tenggara Barat	0.82	Jambi	1.29	Kepulauan Riau	2.47	Bengkulu	5.32
Banten	0.02	Sumatera Selatan	0.20	Sumatera Utara	0.84	Gorontalo	1.64	Sulawesi Tengah	2.49	Maluku	7.42
Jawa Timur	0.02	Riau	0.20	Kalimantan Barat	0.85			Kep. Bangka Belitung	2.66	Nusa Tenggara Timur	19.41
Jawa Tengah	0.03	Sumatera Barat	0.25							Papua Barat	52.27
										Papua	60.56

Sumber : Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

*Annual Parasite Incidence (API)* adalah jumlah kasus malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium terhadap jumlah populasi berisiko. API malaria pada tahun 2011 sebesar 1,83 per 1.000 penduduk. API tahun 2012 relatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 1,69. Pada tahun 2012 terdapat 12 provinsi yang belum mencapai target API sebesar < 2 per 1.000 penduduk.

# INCIDENCE RATE (IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

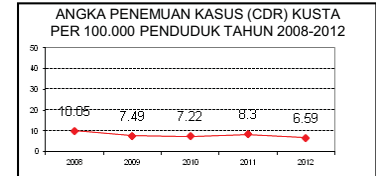
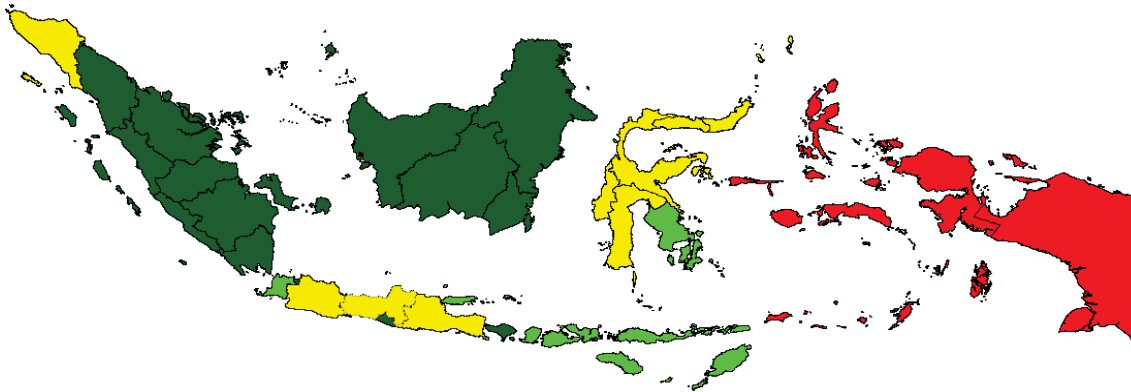


< 35				35 - 55			55 - 75		> 75				
Papua Barat	3.19	Riau	19.43	Papua	26.59	Sumatera Utara	36.82	Aceh	50.57	Sulawesi Utara	55.30	Kalimantan Timur	76.52
Maluku Utara	6.13	Gorontalo	20.94	Sulawesi Selatan	28.01	Kalimantan Barat	39.16	Sulawesi Barat	50.70	Bali	65.90	Kep. Bangka Belitung	84.32
Maluku	6.98	Jawa Timur	21.49	DI Yogyakarta	28.16	Sumatera Selatan	42.71	Bengkulu	53.60	Sumatera Barat	66.72	Sulawesi Tengah	84.95
Sulawesi Tenggara	16.72	Nusa Tenggara Barat	21.67	Jambi	30.59	Jawa Barat	44.85	Kepulauan Riau	53.62	Kalimantan Tengah	67.06		
Jawa Tengah	19.29	Nusa Tenggara Timur	23.62	Banten	32.69	Kalimantan Selatan	44.85			Lampung	68.44		
										DKI Jakarta	68.48		

Sumber : Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Incidence Rate Demam Berdarah Dengue (IR DBD) adalah jumlah kasus DBD terhadap penduduk berisiko. IR DBD di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 65,7 per 100.000 penduduk. Dengan demikian angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 68,22 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010 terdapat 14 provinsi dengan IR DBD yang belum mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan 2010 sebesar < 55 per 100.000 penduduk.

## ANGKA PENEMUAN KASUS (CDR) KUSTA PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012



< 5				5 - 10		10 - 30 atau kasus 1000-5000				> 30 atau kasus > 5000										
1	KALIMANTAN BARAT	0,69	7	RIAU	1,47	13	KALIMANTAN TENGAH	2,80	17	BANTEN	6,75	21	JAWA TENGAH	4,64	26	SULAWESI TENGAH	13,31	30	PAPUA	36,07
2	KEPULAUAN RIAU	0,76	8	BENGKULU	1,69	14	KEP. BANGKA BELITUNG	2,92	18	NUSA TENGGARA TIMUR	7,16	22	JAWA BARAT	5,19	27	SULAWESI BARAT	17,29	31	MALUKU	40,09
3	SUMATERA BARAT	0,80	9	JAMBI	1,82	15	DI YOGYAKARTA	3,83	19	NUSA TENGGARA BARAT	8,56	23	JAWA TIMUR	9,41	28	SULAWESI UTARA	18,40	32	PAPUA BARAT	44,43
4	SUMATERA SELATAN	0,87	10	LAMPUNG	1,86	16	KALIMANTAN SELATAN	4,67	20	SULAWESI TENGGARA	9,55	24	ACEH	12,25	29	GORONTALO	20,25	33	MALUKU UTARA	49,14
5	KALIMANTAN TIMUR	1,28	11	DKI JAKARTA	2,32							25	SULAWESI SELATAN	13,20						
6	SUMATERA UTARA	1,35	12	BALI	2,47															

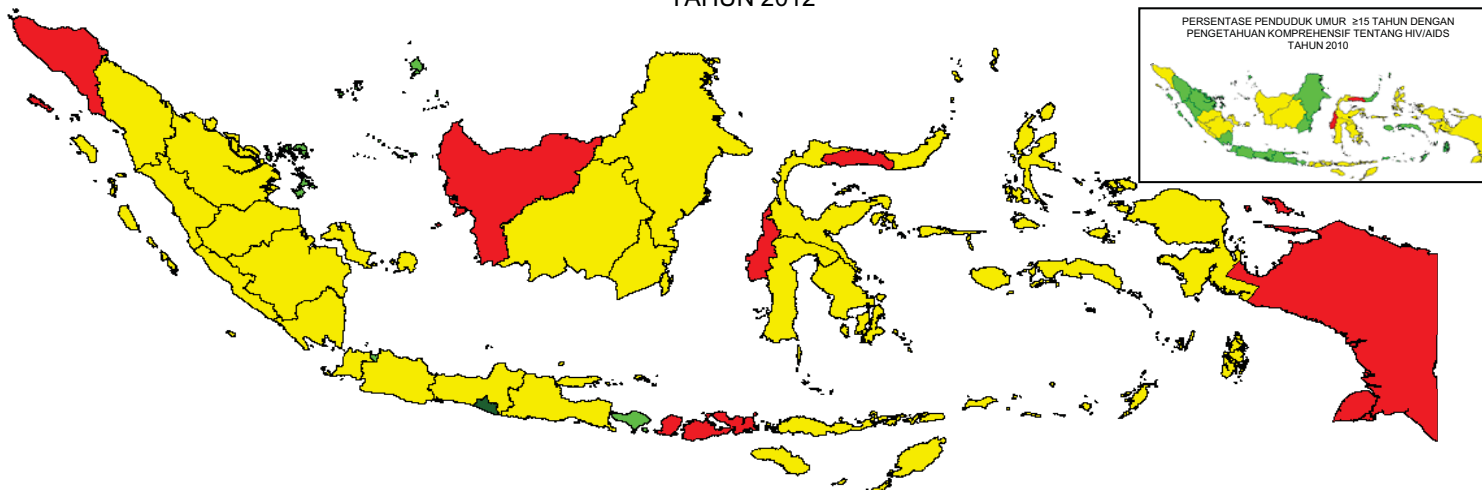
Sumber : Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Angka penemuan kasus (CDR) kusta pada tahun 2012 sebesar 6,59 per 100.000 penduduk, relatif menurun dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Terdapat 20 provinsi dengan kasus kusta low endemic (angka penemuan kasus kusta < 10 per 100.000 penduduk atau jumlah kasus < 1.000 ). Sebanyak 13 lainnya termasuk kelompok high endemic. Keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru dapat diukur dari tinggi rendahnya proporsi cacat tingkat II. Pada tahun 2012 persentase cacat tingkat II sebesar 5,8%, relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

## PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN DAN PRIA KAWIN 15-54 TAHUN YANG MEMILIKI PENGETAHUAN TENTANG CARA MENGURANGI RISIKO TERKENA HIV AIDS

(DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM SETIAP BERHUBUNGAN SEKS DAN MEMBATASI HUBUNGAN SEKS DENGAN SATU PASANGAN)

TAHUN 2012

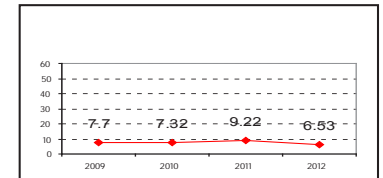
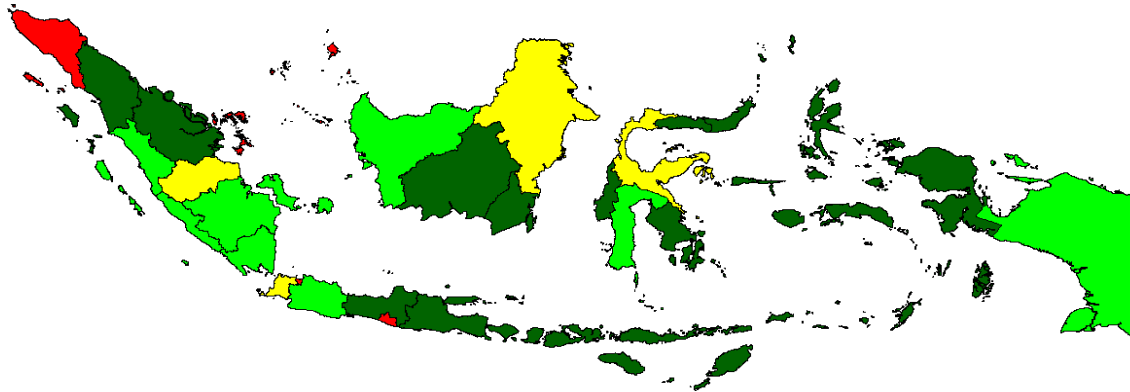


< 60%		45% - 60%		30% - 45%								< 30%						
1	DI YOGYAKARTA	71,22		5	SULAWESI UTARA	43,79	11	JAWA TENGAH	40,36	17	KEP. BANGKA BELITUN	38,07	23	PAPUA BARAT	33,71	28	NUSA TENGGARA BARAT	29,52
2	BALI	51,51		6	KALIMANTAN SELATAN	43,54	12	LAMPUNG	40,35	18	SULAWESI TENGGARA	37,82	24	NUSA TENGGARA TIMU	32,74	29	KALIMANTAN BARAT	28,23
3	DKI JAKARTA	47,06		7	SUMATERA BARAT	43,25	13	JAMBI	39,66	19	RIAU	37,41	25	SULAWESI TENGAH	30,83	30	ACEH	28,10
4	KEPULAUAN RIAU	46,60		8	KALIMANTAN TIMUR	41,99	14	BANTEN	38,76	20	SUMATERA SELATAN	35,15	26	MALUKU UTARA	30,46	31	PAPUA	26,73
				9	JAWA TIMUR	41,43	15	JAWA BARAT	38,55	21	BENGKULU	34,44	27	SULAWESI SELATAN	30,22	32	GORONTALO	22,71
				10	SUMATERA UTARA	40,6	16	MALUKU	38,37	22	KALIMANTAN TENGAH	34,16				33	SULAWESI BARAT	20,13

Sumber : SDKI 2012 dan Riskesdas 2010

Berdasarkan hasil SDKI 2012 terdapat 76,7% wanita umur 15-49 tahun yang pernah mendengar tentang HIV AIDS, lebih rendah dibandingkan pria kawin umur 15-54 tahun dengan pengetahuan yang sama sebesar 82,3%. Provinsi tertinggi yang pernah mendengar HIV AIDS yaitu DKI Jakarta. Sementara persentase wanita umur 15-49 tahun dan pria kawin umur 15-54 tahun yang memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi risiko HIV AIDS tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu 70,4% pada wanita dan 75,2% pada pria.

# ANGKA KESAKITAN CAMPAK PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

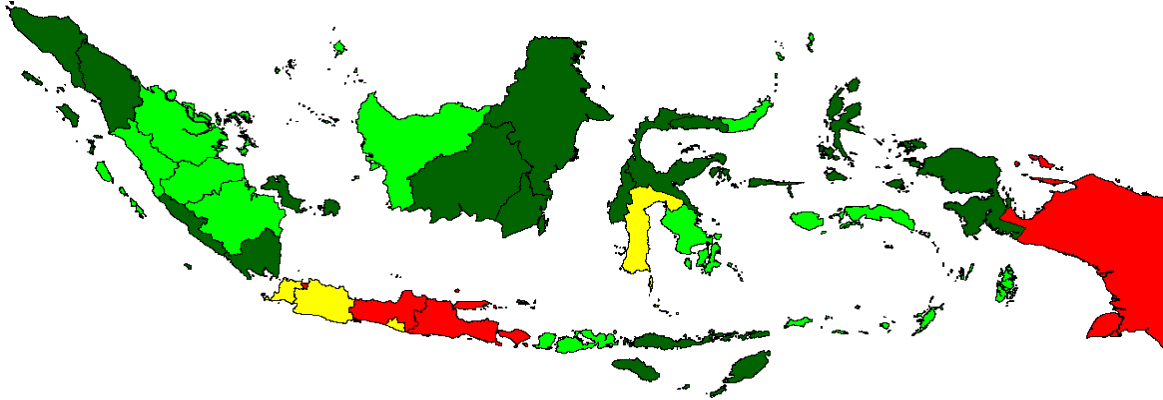


< 5				5 - 10				10 - 15		> 15			
1 MALUKU UTARA	0,00	7 NTT	1,27	13 KALIMANTAN TENGAH	4,06	17 PAPUA	5,12	22 SUMATERA BARAT	8,53	26 KALIMANTAN TIMUR	10,07	30 DKI JAKARTA	19,20
2 SULAWESI BARAT	0,25	8 KALIMANTAN SELATAN	1,33	14 GORONTALO	4,33	18 SUMATERA SELATAN	5,28	23 KALIMANTAN BARAT	8,99	27 JAMBI	11,51	31 KEPULAUAN RIAU	20,89
3 NTB	0,50	9 JAWA TENGAH	1,50	15 RIAU	4,57	19 KEP. BABEL	5,54	24 SULAWESI SELATAN	9,01	28 SULAWESI TENGAH	11,81	32 ACEH	23,20
4 BALI	0,76	10 SUMATERA UTARA	2,24	16 SULAWESI UTARA	4,73	20 JAWA BARAT	5,86	25 BENGKULU	9,82	29 BANTEN	14,97	33 D I YOGYAKARTA	31,00
5 PAPUA BARAT	0,86	11 JAWA TIMUR	2,85			21 LAMPUNG	7,83						
6 MALUKU	0,93	12 SULAWESI TENGGARA	3,92										

Sumber : Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Angka kesakitan campak tahun 2012 sebesar 6,53 per 100.000 penduduk. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, angka kesakitan cenderung menurun. Provinsi dengan angka kesakitan terendah yaitu Maluku Utara (dilaporkan tidak ada kasus) dan tertinggi Provinsi DI Yogyakarta dengan angka kesakitan campak 31 per 100.000 penduduk. Sebesar 4 provinsi memiliki angka kesakitan campak >15 per 100.000 penduduk yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Aceh, dan DI Yogyakarta.

## JUMLAH KASUS BARU AIDS TAHUN 2012



< 50		50 - 150		151 - 250		> 250		tidak ada data								
1	SULAWESI BARAT	3	7	13	SULAWESI TENGGARA	56	18	MALUKU	117	23	JAWA BARAT	184	27	PAPUA	639	SUMATERA UTARA
2	BENGKULU	6	8	14	JAMBI	62	19	SUMATERA BARAT	120	24	BANTEN	205	28	DKI JAKARTA	649	LAMPUNG
3	GORONTALO	14	9	15	SUMATERA SELATAN	62	20	NUSA TENGGARA BARAT	123	25	SULAWESI SELATAN	206	29	BALI	650	
4	KALIMANTAN TENGAH	14	10	16	KALIMANTAN BARAT	89	21	RIAU	128	26	DI YOGYAKARTA	243	30	JAWA TENGAH	798	
5	IRIAN JAYA BARAT	17	11	17	KEPULAUAN RIAU	99	22	SULAWESI UTARA	144				31	JAWA TIMUR	822	
6	KALIMANTAN SELATAN	22	12													

Sumber : Ditjen PPPL Kemkes RI, 2013

Jumlah kasus AIDS yang baru terdeteksi tahun 2012 sebanyak 5.686 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7.004 kasus. 10 provinsi dengan kasus baru tertinggi tahun 2012 yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Papua, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Persentase kasus baru AIDS pada IDU sebesar 9,2%. Sedangkan kasus infeksi HIV sebanyak 21.511.

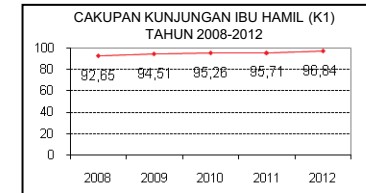
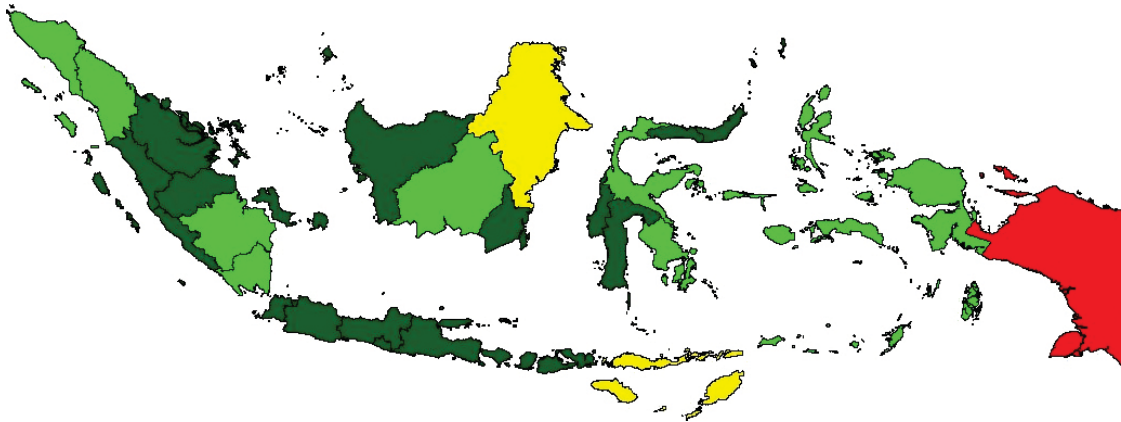


PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012

# UPAYA KESEHATAN



# CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1) TAHUN 2012

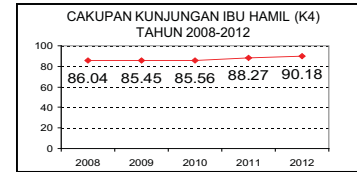
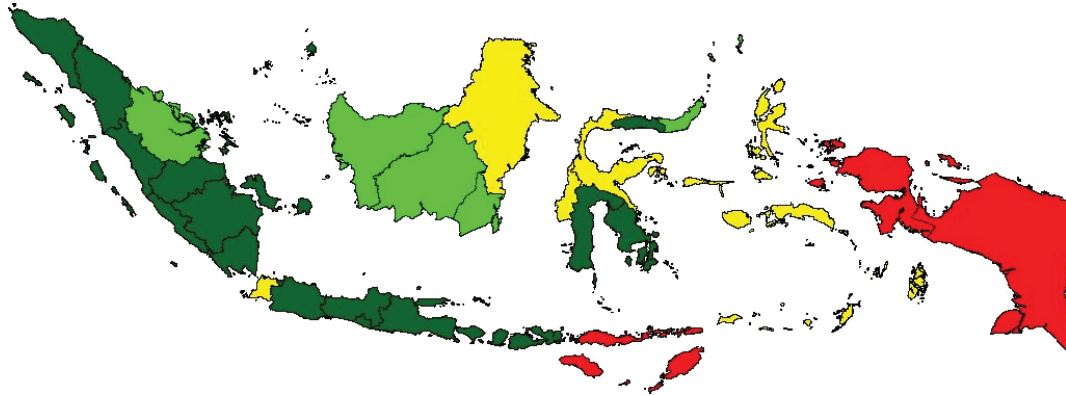


> 95%				90%-95%				85%-90%		< 85%											
1	Gorontalo	106,34	8	DI Yogyakarta	100,00	15	Sulawesi Barat	97,36	21	Kalimantan Tengah	94,15	28	Sumatera Utara	92,16	31	Nusa Tenggara Timur	88,57	33	Papua	50,11	
2	Sumatera Barat	105,55	9	DKI Jakarta	99,85	16	Jawa Timur	96,99	22	Sumatera Selatan	93,86	29	Sulawesi Tenggara	91,26	32	Kalimantan Timur	85,44				
3	Kalimantan Selatan	104,76	10	Jawa Barat	99,68	17	Jambi	96,93	23	Maluku	93,65	30	Papua Barat	90,51							
4	Sulawesi Selatan	101,07	11	Banten	99,60	18	Kep. Riau	96,29	24	Lampung	93,63										
5	Kep. Bangka Belitung	100,46	12	Jawa Tengah	98,89	19	Kalimantan Barat	95,86	25	Aceh	93,31										
6	Riau	100,36	13	Nusa Tenggara	97,86	20	Sulawesi Utara	95,54	26	Maluku Utara	92,23										
7	Bengkulu	100,13	14	Bali	97,58				27	Sulawesi Tengah	92,17										

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2011

Cakupan pelayanan ibu hamil K1 pada tahun 2012 sebesar 96,84%. Capaian ini dibandingkan tahun 2011 sebesar 95,71%. Cakupan menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012, provinsi dengan capaian tertinggi adalah Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua sebesar 50,11%.

## PERSENTASE KUNJUNGAN IBU HAMIL (K4) TAHUN 2012

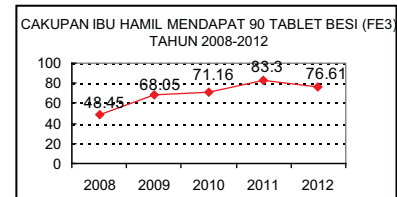
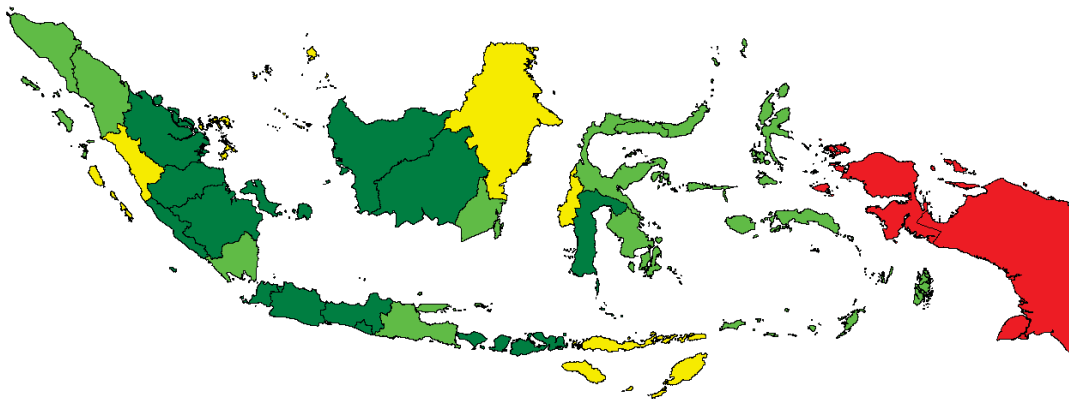


> 90%				85%-90%				80%-85%				< 80%					
1	DKI Jakarta	96,37	8	Sumatera Selatan	93,64	15	Sulawesi Tenggara	90,83	20	Kalimantan Tengah	89,96	25	Maluku Utara	84,99	31	Nusa Tenggara Timur	67,67
2	Jawa Tengah	95,65	9	Jawa Barat	93,30	16	Sumatera Utara	90,61	21	Kalimantan Barat	89,33	26	Kalimantan Timur	84,92	32	Papua Barat	64,34
3	Kep. Bangka Belitung	95,43	10	Sulawesi Selatan	93,02	17	DI Yogyakarta	90,46	22	Sulawesi Utara	88,65	27	Banten	84,43	33	Papua	34,48
4	Bengkulu	95,28	11	Kepulauan Riau	92,46	18	Aceh	90,34	23	Kalimantan Selatan	87,53	28	Sulawesi Tengah	81,52			
5	Gorontalo	94,70	12	Lampung	91,82	19	Sumatera Barat	90,02	24	Riau	86,04	29	Sulawesi Barat	80,76			
6	Bali	94,45	13	Nusa Tenggara Barat	91,34							30	Maluku	80,50			
7	Jambi	94,15	14	Jawa Timur	90,87												

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2011

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2012 sebesar 90,18%. Angka cakupan ini telah mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2012 sebesar 90%. Terdapat 19 provinsi (57,6%) telah mencapai target Renstra 2012. Provinsi dengan cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar (96,37%) dan terendah Papua sebesar 34,48%.

# CAKUPAN PEMBERIAN 90 TABLET BESI (FE3) PADA IBU HAMIL TAHUN 2012

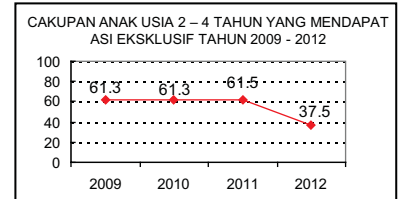
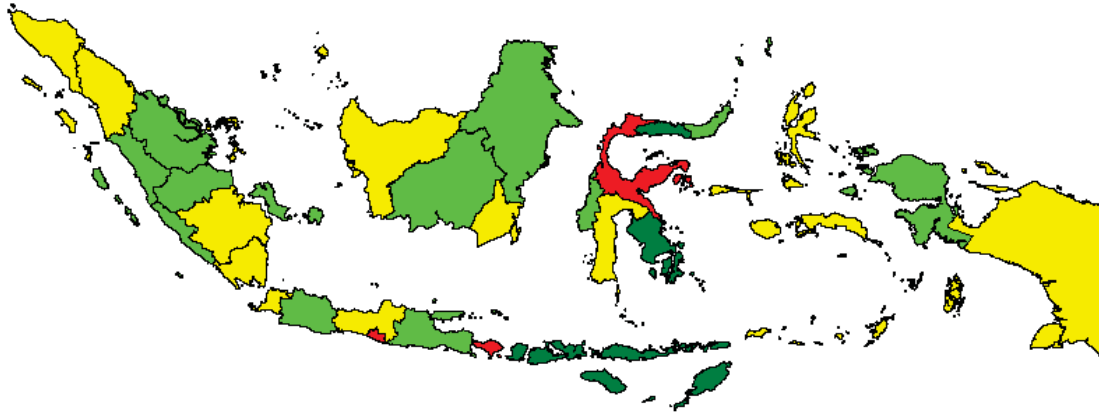


>=84%				74%-84%				64%-74%			<64%									
1	Kalimantan Tengah	115,33	8	Jawa Barat	89,26	15	NTB	84,28	16	Jawa Timur	83,85	23	Sumatera Utara	78,28	27	Sulawesi Barat	73,99	31	Papua	33,32
2	DKI Jakarta	101,88	9	Sumatera Selatan	88,83				17	Gorontalo	83,15	24	Maluku Utara	76,40	28	NTT	71,96	31	Papua Barat	32,03
3	Bali	92,68	10	Sulawesi Selatan	88,76				18	Sulawesi Utara	82,86	25	Kalimantan Selatan	75,79	29	Sumatera Barat	71,57			
4	Kep. Bangka Belitung	92,29	11	Banten	87,20				19	Aceh	82,28	26	Sulawesi Tenggara	75,58	30	Kepulauan Riau	71,16			
5	Jawa Tengah	91,14	12	Kalimantan Barat	86,89				20	Maluku	82,00				31	Kalimantan Timur	69,08			
6	Jambi	89,79	13	Riau	86,36				21	Sulawesi Tengah	81,27									
7	DI Yogyakarta	89,55	14	Bengkulu	85,05				22	Lampung	80,58									

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Pada tahun 2012 cakupan pemberian 90 tablet besi (Fe3) pada ibu hamil di Indonesia sebesar 76,61%. Salah satu syarat pelayanan ibu hamil K4 adalah mendapat 90 tablet besi, oleh karena itu minimal cakupan Fe3 yang harus dicapai adalah sama dengan cakupan K4. Target Renstra Kementerian Kesehatan 2012 untuk cakupan K4 yang harus dicapai tahun 2012 adalah 84%. Dengan demikian, capaian nasional tahun 2012 untuk cakupan Fe3 yang sebesar 76,61% masih belum mencapai target Renstra K4 yang diharapkan yaitu sebesar 84%.

# CAKUPAN ANAK USIA 2 – 4 TAHUN YANG MENDAPAT ASI EKSKLUSIF TAHUN 2012



>50%	
1 NTB	61,77
2 NTT	58,04
3 Gorontalo	57,52
4 Sulawesi Tenggara	51,67

40%-50%			
5 Jawa Timur	47,00	12 Jambi	41,64
6 Kep. Bangka Belitung	46,49	13 Jawa Barat	41,22
7 Kalimantan Timur	45,56	14 Sulawesi Utara	40,98
8 Sumatera Barat	43,76	15 Sulawesi Barat	40,41
9 Bengkulu	43,23	16 Riau	40,02
10 Kalimantan Tengah	42,79		
11 Papua Barat	41,92		

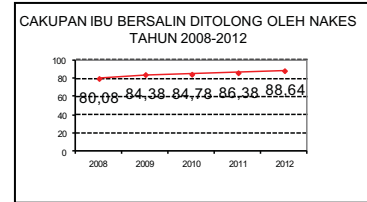
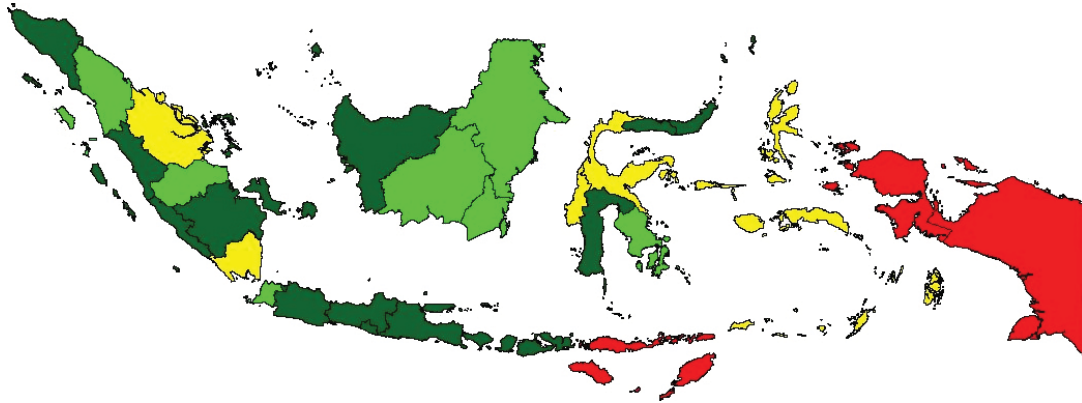
30%-40%			
17 Papua	39,25	24 Sulawesi Selatan	34,39
18 Sumatera Selatan	39,09	25 Maluku Utara	34,04
19 Maluku	38,69	26 Jawa Tengah	33,12
20 Lampung	37,85	27 Dki Jakarta	33,04
21 Kepulauan Riau	36,63	28 Aceh	31,42
22 Kalimantan Selatan	35,77	29 Banten	31,09
23 Sumatera Utara	35,58	30 Kalimantan Barat	30,14

<30%	
31 DI Yogyakarta	26,68
32 Bali	26,20
33 Sulawesi Tengah	20,53

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2013

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan. Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia sebesar 37,55. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2011 dan 2010 sebesar 61,5 dan 61,3. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah NTB sebesar 61,77% dan provinsi dengan cakupan terendah adalah Sulawesi Tengah sebesar 20,53%.

# CAKUPAN IBU BERSALIN DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TAHUN 2012

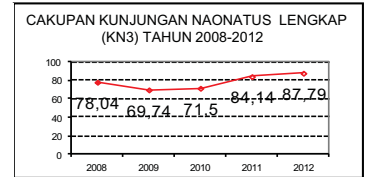


> 88%				83%-88%		72%-80%		< 72%									
1	DI Yogyakarta	98,62	8	Gorontalo	93,61	15	Sumatera Barat	89,10	18	Sumatera Utara	87,80	25	Lampung	81,90	31	Nusa Tenggara Timur	69,41
2	Kepulauan Riau	97,95	9	Sulawesi Selatan	91,97	16	Nusa Tenggara Barat	88,89	19	Jambi	86,91	26	Sulawesi Barat	81,42	32	Papua Barat	65,15
3	Kep. Bangka Belitung	97,95	10	Jawa Barat	89,85	17	Sulawesi Utara	88,63	20	Banten	85,87	27	Maluku Utara	80,61	33	Papua	43,54
4	DKI Jakarta	97,86	11	Aceh	89,78				21	Kalimantan Selatan	85,73	28	Sulawesi Tengah	79,99			
5	Jawa Tengah	97,34	12	Kalimantan Barat	89,54				22	Kalimantan Tengah	84,83	29	Riau	79,24			
6	Bali	95,82	13	Sumatera Selatan	89,41				23	Kalimantan Timur	83,87	30	Maluku	78,07			
7	Bengkulu	95,03	14	Jawa Timur	89,12				24	Sulawesi Tenggara	83,02						

Sumber: Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2012

Cakupan ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2012 adalah sebesar 88,64% yang berarti telah mencapai target Renstra 2011 sebesar 88%. Terdapat 17 provinsi (51,5%) yang telah mencapai target Renstra tahun 2012. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 98,62%. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua sebesar 43,54%. Dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) cakupan salin nakes menunjukkan kecenderungan peningkatan.

# CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS LENGKAP (KN3) TAHUN 2012

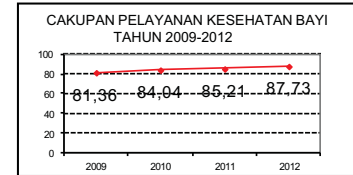
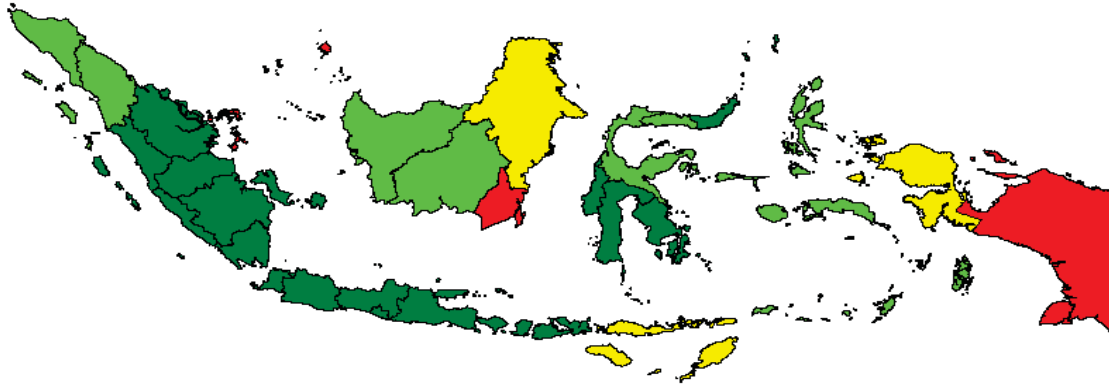


> 80%										60% - 80%		40% - 60%		40% - 60%									
1	Bali	97,42	7	NTB	91,48	13	Lampung	87,58	19	Sulawesi Tenggara	85,34	25	Aceh	80,70	27	Maluku Utara	79,46	32	Papua Barat	57,42	Papua	29,70	
2	Kep. Bangka Belitung	95,77	8	Jambi	91,28	14	Kalimantan Tengah	86,91	20	Riau	84,95	26	Sulawesi Utara	80,69	28	NTT	78,63						
3	Jawa Tengah	95,75	9	Sulawesi Selatan	90,58	15	Bengkulu	86,46	21	Sulawesi Barat	83,31				29	Maluku	71,75						
4	Jawa Timur	95,70	10	Banten	89,46	16	Kalimantan Barat	85,96	22	Sumatera Utara	82,69				30	Kalimantan Timur	69,35						
5	DI Yogyakarta	92,51	11	DKI Jakarta	89,06	17	Gorontalo	85,80	23	Sumatera Barat	82,09				31	Kepulauan Riau	66,83						
6	Sumatera Selatan	91,51	12	Jawa Barat	88,49	18	Sulawesi Tengah	85,41	24	Kalimantan Selatan	81,88												

Sumber: Ditjen Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2013

Sejak tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan waktu pelaksanaan kunjungan neonatal lengkap dari semula minimal 2 kali kunjungan menjadi 3 kali kunjungan. Pada tahun 2012, cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) di Indonesia sebesar 87,79% dengan cakupan tertinggi di Provinsi Bali (97,42%) dan terendah Papua (29,70%). Sebanyak 26 provinsi (39,4%) telah mencapai cakupan KN3 lebih dari 80%.

# CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI TAHUN 2012

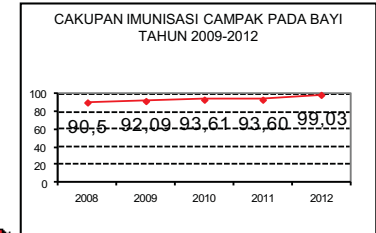
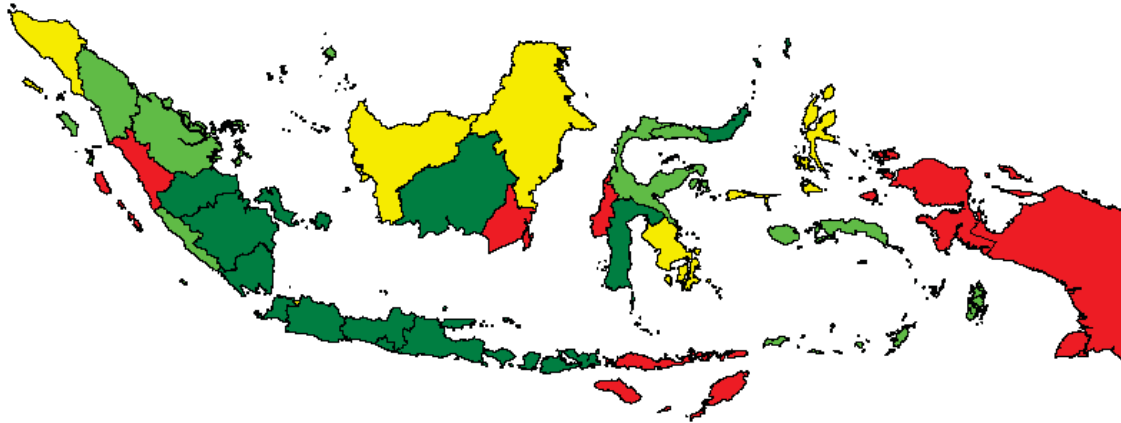


>84%				74%-84%				64%-74%		<64%				
1	NTB	95,82	8	Sulawesi Barat	92,01	15	DI Yogyakarta	89,1	28	Papua Barat	73,8	31	Kalimantan Selatan	57,23
2	Jawa Tengah	95,43	9	Dki Jakarta	91,99	16	Lampung	87,8	29	NTT	72,8	32	Kepulauan Riau	56,14
3	Jawa Timur	95,13	10	Sulawesi Utara	91,84	17	Bengkulu	86,9	30	Kalimantan Timur	67,8	33	Papua	29,47
4	Sulawesi Selatan	94,68	11	Jawa Barat	91,83	18	Riau	86,8						
5	Kepulauan Bangka	93,41	12	Sumatera Selatan	90,35									
6	Banten	93,14	13	Jambi	90,02									
7	Bali	93,11	14	Sulawesi Tenggara	89,25	19	Kalimantan Tengah	82,7	26	Sumatera Barat	77,28			
						20	Maluku	81,3	27	Sulawesi Tengah	75,28			
						21	Sumatera Utara	79,5						
						22	Maluku Utara	79,3						
						23	Gorontalo	78,4						
						24	Kalimantan Barat	77,5						
						25	Aceh	77,4						

Sumber: Dit. Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2013

Pelayanan Kesehatan Bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pada tahun 2012 cakupan pelayanan kesehatan bayi di Indonesia sebesar 87,73%. Target Renstra yang harus dicapai tahun 2012 adalah 84%. Dengan demikian, capaian nasional telah mencapai target dan sebanyak 18 provinsi telah mencapai target Renstra 2012. Sementara itu target SPM Kesehatan untuk cakupan kunjungan bayi pada tahun 2010 sebesar 90%. Sebanyak 13 provinsi (36,4%) telah mencapai target tersebut.

# CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2012



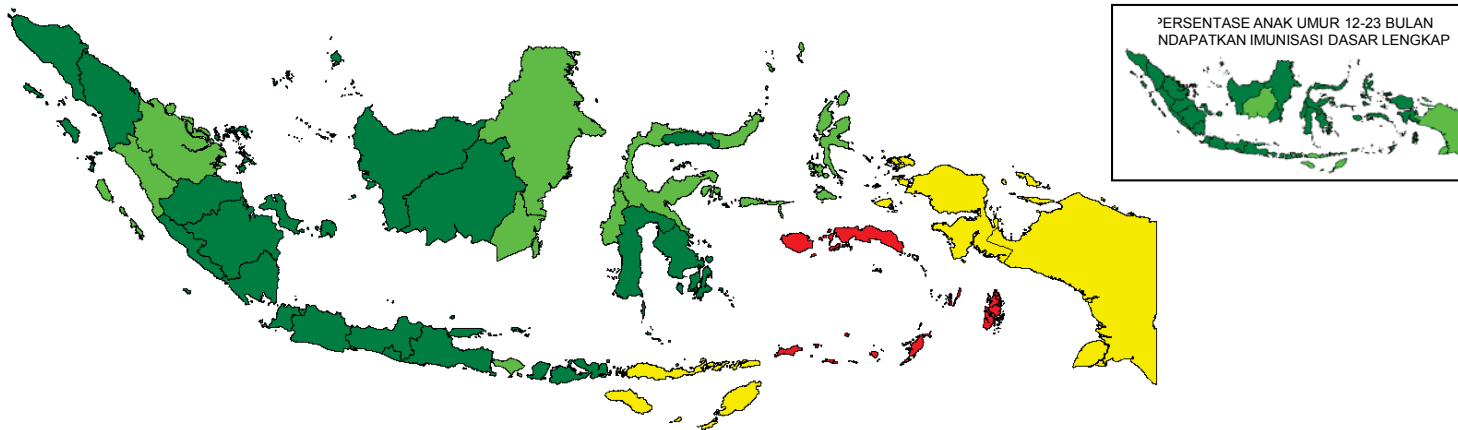
> 95%				90% - 95%				85% - 90%		< 85%				
1	Jambi	113,23	7	Jawa Tengah	102,48	13	Kalimantan Tengah	96,24	22	Kalimantan Barat	89,82	28	NTT	84,21
2	NTB	110,40	8	DI Yogyakarta	102,01	14	Kep. Bangka Belitung	95,51	23	Aceh	89,35	29	Sumatera Barat	82,43
3	Jawa Barat	110,34	9	Lampung	101,76				24	DKI Jakarta	89,25	30	Sulawesi Barat	78,45
4	Sumatera Selatan	108,90	10	Sulawesi Selatan	99,51				25	Kalimantan Timur	86,80	31	Kalimantan Selatan	74,95
5	Jawa Timur	105,47	11	Banten	98,16				26	Maluku Utara	86,30	32	Papua	74,27
6	Sulawesi Utara	103,88	12	Bali	98,15				27	Sulawesi Tenggara	86,27	33	Papua Barat	67,44
						15	Sumatera Utara	94,42	20	Kepulauan Riau	90,62			
						16	Gorontalo	93,31	21	Riau	90,07			
						17	Maluku	91,58						
						18	Bengkulu	91,13						
						19	Sulawesi Tengah	91,11						

Sumber: Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013

Cakupan imunisasi campak pada bayi di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 99,03%. Cakupan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 93,60%. Sebanyak 14 provinsi dengan cakupan imunisasi campak pada bayi di atas 95%, namun masih terdapat 6 provinsi dengan cakupan imunisasi campak pada bayi kurang dari 85%.



# PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP TAHUN 2012

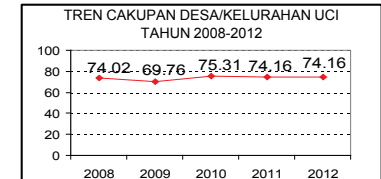


> 80%						60% - 80%						40% - 60%		< 40%									
1	NTB	107,4	7	Sumatera Selatan	93,3	13	Sulawesi Selatan	88,8	19	Sumatera Utara	81,1	21	Sumatera Barat	77,2	27	Sulawesi Barat	69,8	30	NTB	54,4	33	Maluku	36,5
2	Jawa Barat	102,1	8	Banten	91,3	14	Kalimantan Tengah	86,2	20	DKI Jakarta	80,1	22	Sulawesi Tengah	76,5	28	Bali	67,0	31	Papua Barat	48,2			
3	Lampung	98,7	9	Gorontalo	91,1	15	Sulawesi Tenggara	86,0				23	Sulawesi Utara	73,8	29	Kalimantan Timur	66,5	32	Papua	45,7			
4	DI Yogyakarta	95,5	10	Bengkulu	90,9	16	Kalimantan Barat	84,6				24	Riau	73,7									
5	Kep. Babel	94,0	11	Jawa Tengah	90,2	17	Jawa Timur	84,5				25	Kalimantan Selatan	72,0									
6	Jambi	93,9	12	Aceh	89,2	18	Kepulauan Riau	81,9				26	Maluku Utara	69,9									

Sumber: Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013

Persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 87,79%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 78,70%. Sebanyak 20 provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan di atas 80%, namun masih terdapat 4 provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan kurang dari 60%.

# CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) TAHUN 2012

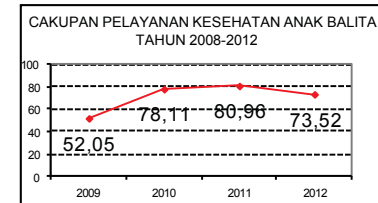
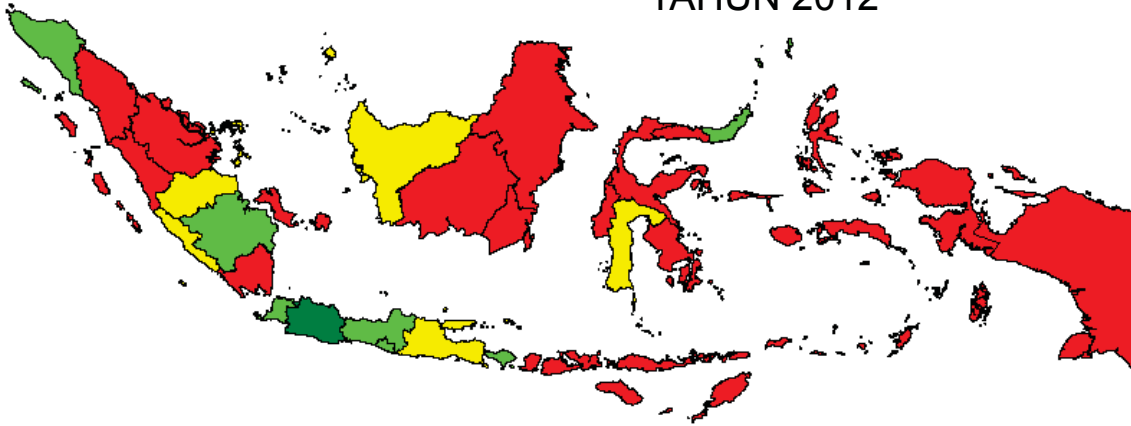


>85%		78%-85%		71%-78%		<71%											
1	DKI Jakarta	100,00	8	Sumatera Barat	91,01	15	Sulawesi Tengah	83,24	18	Sulawesi Tenggara	76,17	24	Kalimantan Barat	70,30	31	Kalimantan Timur	65,2
2	DI Yogyakarta	100,00	9	Sumatera Selatan	90,72	16	Bengkulu	80,92	19	Sulawesi Barat	75,35	25	Maluku Utara	70,08	32	Papua Barat	29,6
3	Jawa Tengah	98,82	10	Lampung	89,97	17	Kepulauan Riau	79,78	20	Sulawesi Utara	73,01	26	Aceh	69,39	33	Papua	16,6
4	Kep. Bangka Belitung	95,10	11	NTB	89,07				21	NTT	72,83	27	Sumatera Utara	68,54			
5	Bali	94,27	12	Banten	87,09				22	Kalimantan Tengah	72,82	28	Riau	68,17			
6	Jambi	92,40	13	Sulawesi Selatan	87,06				23	Maluku	71,01	29	Kalimantan Selatan	67,21			
7	Jawa Barat	91,70	14	Jawa Timur	85,71							30	Gorontalo	67,03			

Sumber: Ditjen PPPL, Kemkes RI, 2013

Tahun 2012 cakupan desa/kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*) nasional mencapai 74,16%, dengan provinsi tertinggi di DI Yogyakarta (100%) dan terendah Gorontalo (50,96%). Target Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 adalah 80%. Dengan demikian terdapat 11 provinsi yang telah mencapai target Renstra 2012.

# CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA TAHUN 2012

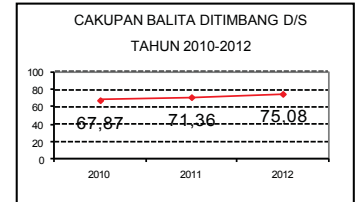
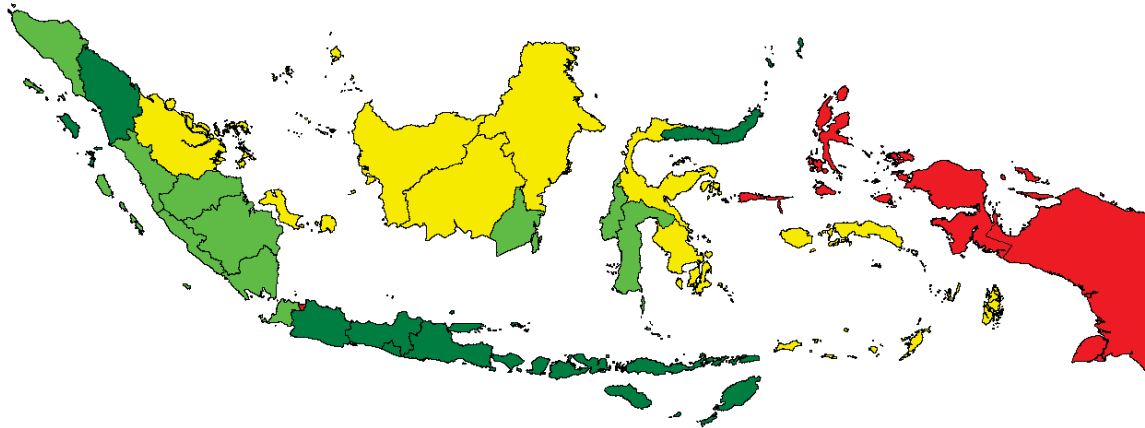


>85%			78%-85%		71%-78%		<71%										
1	DKI Jakarta	89,96	3	Bali	83,92	10	Sumatera Barat	77,86	17	NTB	70,98	24	Kalimantan Timur	60,41	31	Kep. Bangka Belitung	51,62
2	Jawa Barat	85,74	4	Jawa Tengah	82,86	11	Sulawesi Selatan	77,63	18	Maluku	68,28	25	Sulawesi Tengah	56,92	32	Gorontalo	46,91
			5	D I Yogyakarta	82,59	12	Jambi	75,31	19	Kalimantan Tengah	68,03	26	Riau	54,83	33	Papua	18,95
			6	Sumatera Selatan	81,13	13	Bengkulu	75,12	20	Sulawesi Barat	66,58	27	Sulawesi Tenggara	54,71			
			7	Sulawesi Utara	81,04	14	Kepulauan Riau	74,33	21	Sumatera Utara	64,00	28	Maluku Utara	52,81			
			8	Aceh	80,08	15	Jawa Timur	73,37	22	Papua Barat	63,60	29	Kalimantan Selatan	52,62			
			9	Banten	79,70	16	Kalimantan Barat	72,59	23	NTT	62,78	30	Lampung	52,09			

Sumber: Dit. Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2013

Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah pelayanan kesehatan pada anak umur 12–59 bulan sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun dan pemberian Vitamin A 2 kali setahun (Bulan Februari dan Agustus). Pada tahun 2012 cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Indonesia sebesar 73,52%. Target Renstra Kementerian Kesehatan yang harus dicapai tahun 2012 adalah 78%. Dengan demikian, capaian nasional telah mencapai target tahun 2012 dan sebanyak 9 provinsi (58%) telah mencapai target Renstra.

# CAKUPAN BALITA DITIMBANG (D/S) TAHUN 2012

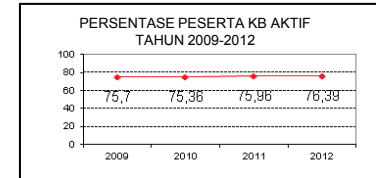
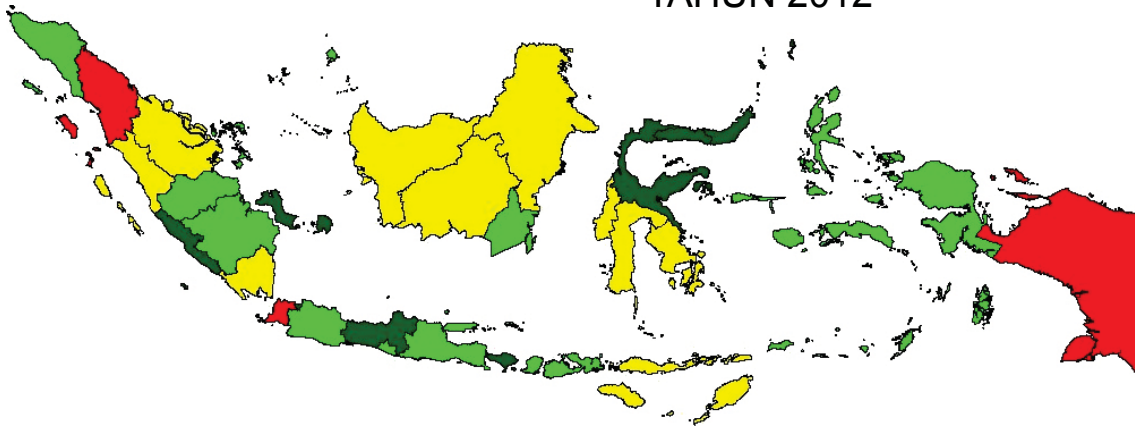


>75%				65%-75%				55%-65%				<55%								
1	Jawa Timur	87,84	8	NTT	78,60	11	Lampung	74,87	18	Bengkulu	69,20	21	Sulawesi Tenggara	62,25	28	Kalimantan Barat	57,75	30	DKI Jakarta	53,29
2	Jawa Barat	83,63	9	Sumatera Utara	75,78	12	Sumatera Selatan	74,51	19	Banten	68,84	22	Kalimantan Timur	61,35	29	Kalimantan Tengah	56,82	31	Maluku Utara	52,46
3	Jawa Tengah	82,13	10	Sulawesi Utara	75,45	13	Jambi	74,37	20	Aceh	66,62	23	Kepulauan Bangka B	60,85				32	Papua Barat	48,87
4	Bali	81,73				14	Sulawesi Selatan	73,53				24	Riau	60,72				33	Papua	30,96
5	Gorontalo	81,05				15	Sulawesi Barat	73,42				25	Maluku	60,20						
6	NTB	79,63				16	Sumatera Barat	72,86				26	Kepulauan Riau	59,73						
7	DI Yogyakarta	78,96				17	Kalimantan Selatan	71,54				27	Sulawesi Tengah	59,60						

Sumber: Dit. Bina Gizi dan KIA, Kemkes RI, 2013

Cakupan balita ditimbang di posyandu (D/S) merupakan indikator yang berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang dan buruk pada balita. Pada tahun 2012 cakupan balita ditimbang (D/S) di Indonesia sebesar 75,1%. Target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2012 adalah 75%. Dengan demikian, capaian nasional tahun 2012 telah mencapai target Renstra. Sebanyak 10 provinsi yang telah mencapai target Renstra tahun 2012.

## PERSENTASE PESERTA KB AKTIF TAHUN 2012

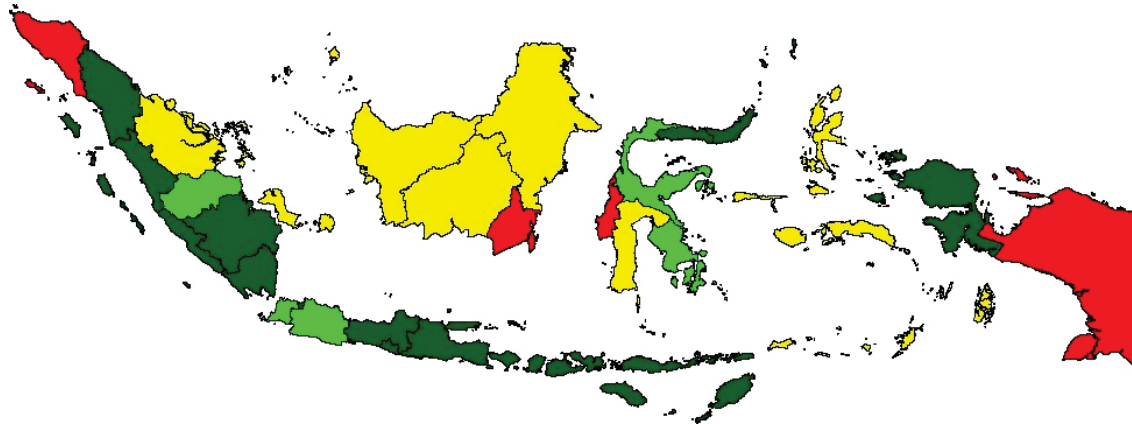


≥ 80%		75%-80%		70%-75%		< 70%											
1	Bengkulu	87,91	9	Jambi	79,81	17	Kepulauan Riau	76,3	21	Sumatera Barat	74,81	29	Lampung	70,65	31	Banten	69,95
2	Gorontalo	86,96	10	Kalimantan Selatan	79,65	18	Maluku Utara	76,3	22	Sulawesi Tenggara	74,77	30	Kalimantan Barat	70,54	32	Sumatera Utara	67,99
3	Bali	86,11	11	DI Yogyakarta	79,43	19	Jawa Barat	76,1	23	Kalimantan Tengah	74,69	33	Papua	67,70			
4	Sulawesi Utara	82,43	12	Aceh	78,76	20	Nusa Tenggara Barat	75,6	24	Sulawesi Selatan	73,64						
5	Sulawesi Tengah	82,12	13	Papua Barat	78,72				25	Sulawesi Barat	73,40						
6	DKI Jakarta	81,38	14	Maluku	78,68				26	Kalimantan Timur	72,28						
7	Kep. Bangka Belitung	81,16	15	Sumatera Selatan	78,6				27	Riau	72,27						
8	Jawa Tengah	80,19	16	Jawa Timur	76,8				28	Nusa Tenggara Timur	71,06						

Sumber: BKKBN RI, 2013

Persentase peserta KB aktif pada tahun 2012 sebesar 76,39%. Persentase tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75,96%. Provinsi dengan persentase peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2012 adalah Bengkulu sebesar 87,91%. Sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 67,7%. Dalam empat tahun terakhir, peserta KB Aktif menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012.

# PERSENTASE PENGGUNA KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) TAHUN 2012



> 25%		20-25		15-20		< 15%	
1 Bali	53,31	9 Gorontalo	29,72	16 Banten	24,35	29 Riau	15,44
2 Papua Barat	41,06	10 Jawa Timur	29,16	17 Sulawesi Tengah	23,25	30 Sulawesi Barat	13,79
3 DI Yogyakarta	35,66	11 Sumatera Utara	28,90	18 Jambi	22,14	31 Papua	13,05
4 Sulawesi Utara	33,77	12 Sumatera Barat	26,57	19 Sulawesi Tenggara	20,90	32 Kalimantan Selatan	10,60
5 DKI Jakarta	33,41	13 Sumatera Selatan	26,43	20 Jawa Barat	20,69	33 Aceh	6,84
6 Nusa Tenggara Timur	32,15	14 Bengkulu	25,79	21 Kalimantan Timur	18,53		
7 Nusa Tenggara Barat	31,07	15 Jawa Tengah	25,68	22 Kepulauan Riau	18,18		
8 Lampung	30,22			23 Maluku Utara	18,16		
				24 Kalimantan Barat	16,82		
				25 Sulawesi Selatan	16,10		
				26 Maluku	15,94		
				27 Kep. Bangka Belitung	15,79		
				28 Kalimantan Tengah	15,63		

Sumber: BKKBN RI, 2013

Persentase penggunaan KB dengan metode MKJP dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu dari 23,06 pada tahun 2009 menjadi 24,89 pada tahun 2012. Tingkat penggunaan MKJP tertinggi terdapat di Provinsi Bali dengan persentase 53,31%. Sedangkan Provinsi Aceh memiliki persentase terendah yaitu sebesar 6,84%. Penggunaan KB dengan metode MKJP dinilai lebih efektif dibandingkan metode non MKJP.

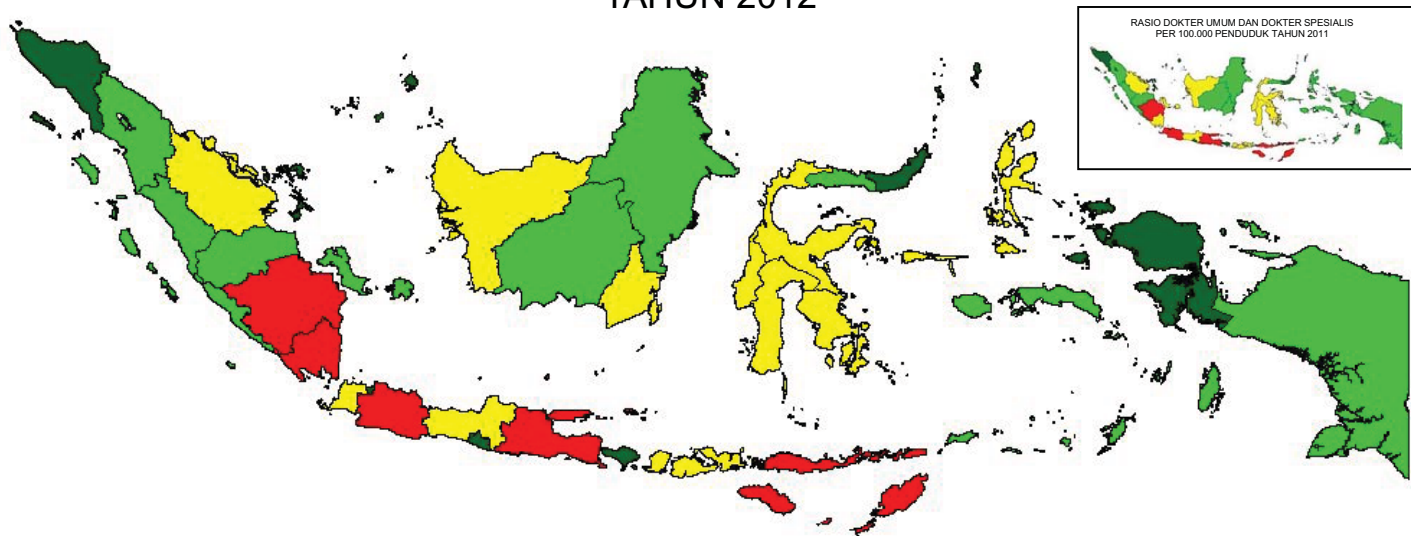


PETA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012

---

# **SUMBER DAYA KESEHATAN**

# RASIO DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012



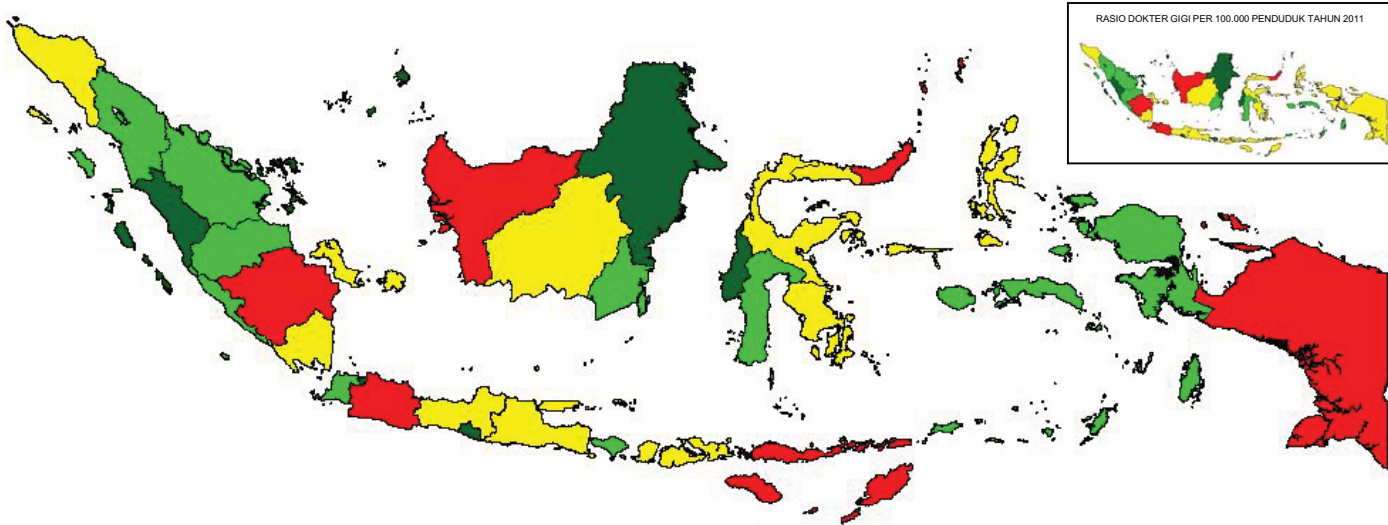
≥ 31		23 - 30,9				15 - 22,9				< 15	
1 DKI Jakarta	68,0	8 Sumatera Utara	30,3	15 Kalimantan Tengah	23,6	18 Maluku Utara	22,1	25 Banten	18,1	29 Lampung	14,7
2 DI Yogyakarta	61,9	9 Sumatera Barat	29,6	16 Kep. Bangka Belitung	23,6	19 Jawa Tengah	20,7	26 Sulawesi Tengah	17,3	30 Nusa Tenggara Timur	12,7
3 Sulawesi Utara	57,5	10 Jambi	29,4	17 Maluku	23,3	20 Kalimantan Selatan	20,7	27 Nusa Tenggara Barat	15,5	31 Sumatera Selatan	12,4
4 Bali	44,2	11 Bengkulu	27,7			21 Sulawesi Barat	20,1	28 Kalimantan Barat	15,4	32 Jawa Barat	9,7
5 Papua Barat	36,2	12 Kalimantan Timur	27,7			22 Sulawesi Selatan	19,6			33 Jawa Timur	9,1
6 Kepulauan Riau	32,5	13 Gorontalo	25,5			23 Sulawesi Tenggara	19,4				
7 Aceh	32,0	14 Papua	25,1			24 Riau	19,1				

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 2013

Data rasio dokter umum dan dokter spesialis dirasioikan dengan jumlah penduduk tahun 2012 (estimasi dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010) menunjukkan rasio dokter umum dan spesialis berkisar antara 9,1 – 68 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter tertinggi dicapai di Provinsi DKI Jakarta dengan 68 dan terendah di Provinsi Jawa Timur dengan rasio 9,1. Rasio dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia adalah 20,6 per 100.000 penduduk. Hasil ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia berada di atas rata-rata nasional.



## RASIO DOKTER GIGI PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

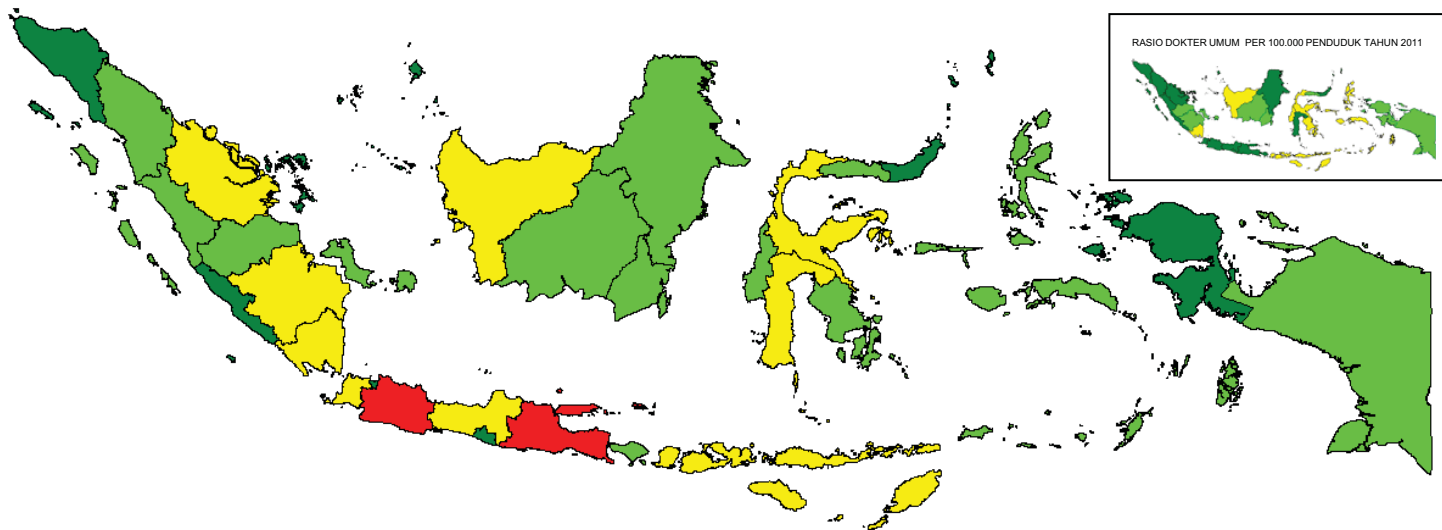


≥ 7		5 - 6,9				3 - 4,9				< 3							
1	DI Yogyakarta	13,0	7	Bali	6,7	14	Bengkulu	5,4	17	Aceh	4,7	24	Sulawesi Tengah	3,2	28	Nusa Tenggara Timur	2,9
2	DKI Jakarta	10,8	8	Maluku	6,6	15	Riau	5,3	18	Kep. Bangka Belitung	4,2	25	Lampung	3,2	29	Papua	2,7
3	Sulawesi Barat	8,1	9	Sumatera Utara	6,1	16	Banten	5,1	19	Sulawesi Tenggara	4,1	26	Nusa Tenggara Barat	3,1	30	Kalimantan Barat	2,6
4	Kalimantan Timur	7,7	10	Sulawesi Selatan	6,1				20	Kalimantan Tengah	3,9	27	Gorontalo	3,1	31	Jawa Barat	2,5
5	Sumatera Barat	7,6	11	Papua Barat	6,0				21	Maluku Utara	3,9				32	Sulawesi Utara	2,2
6	Kepulauan Riau	7,2	12	Jambi	5,5				22	Jawa Tengah	3,6				33	Sumatera Selatan	1,6
			13	Kalimantan Selatan	5,5				23	Jawa Timur	3,3						

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, 2013

Data rasio dokter gigi dirasioikan dengan jumlah penduduk tahun 2012 (estimasi dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010) menunjukkan rasio dokter gigi berkisar antara 1,6–13 dokter gigi per 100.000 penduduk. Rasio dokter tertinggi dicapai di Provinsi DI Yogyakarta dengan 13 dan terendah di Provinsi Sumatera Selatan dengan rasio 1,6. Rasio dokter gigi di Indonesia adalah 4,5 per 100.000 penduduk. Hasil ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia berada di atas rata-rata nasional.

# RASIO DOKTER UMUM PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

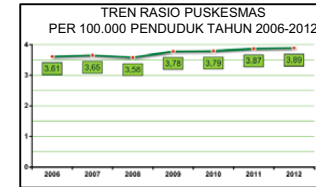
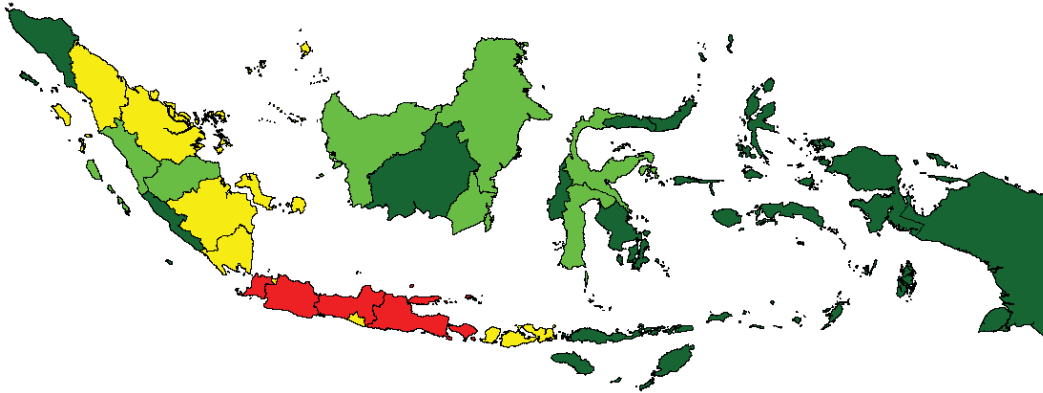


> 24		16 - 24				8 - 16				< 8							
1	Sulawesi Utara	38,73	8	Bali	23,25	15	Maluku	20,51	22	Riau	15,23	29	Lampung	11,37	32	Jawa Timur	7,43
2	DI. Yogyakarta	37,27	9	Kalimantan Timur	22,35	16	Kalimantan Tengah	20,27	23	Sulawesi Tengah	15,21	30	Sumatera Selatan	9,94	33	Jawa Barat	6,42
3	Papua Barat	28,64	10	Gorontalo	22,00	17	Sumatera Barat	20,13	24	Sulawesi Selatan	14,24	31	Banten	9,72			
4	Kepulauan Riau	26,63	11	Papua	21,41	18	Jambi	20,10	25	Jawa Tengah	13,11						
5	DKI Jakarta	25,17	12	Bangka Belitung	21,08	19	Sulawesi Barat	18,68	26	Nusa Tenggara Barat	12,58						
6	Aceh	24,67	13	Maluku Utara	21,03	20	Kalimantan Selatan	16,96	27	Nusa Tenggara Timur	11,80						
7	Bengkulu	24,22	14	Sumatera Utara	20,68	21	Sulawesi Tenggara	16,95	28	Kalimantan Barat	11,76						

Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 2013

Data rasio dokter umum per 100.000 penduduk berdasarkan estimasi jumlah penduduk tahun 2012 di Indonesia sebesar 13,70 yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat sekitar 13,70 dokter. Rasio tertinggi dicapai Provinsi Sulawesi Utara sebesar 38,73 dan terendah di Jawa Barat sebesar 6.42. Sebagian besar provinsi rasio dokter umum berada di atas rata-rata nasional.

# RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

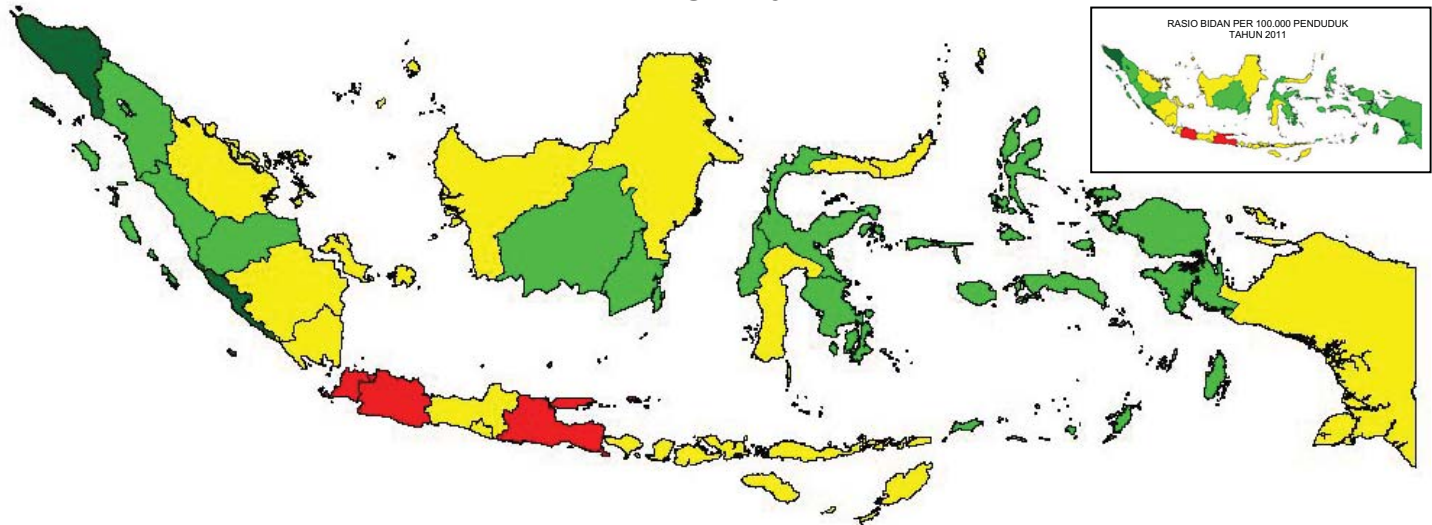


$\geq 7$		5-7		3-5		$< 3$	
1	Papua Barat 15,67	7	Kalimantan Tengah 8,30	13	Sulawesi Tengah 6,43	19	Sulawesi Selatan 5,17
2	Papua 12,12	8	Gorontalo 8,01	14	Kalimantan Selatan 6,00		
3	Sulawesi Tenggara 11,10	9	Sulawesi Utara 7,61	15	Kalimantan Timur 5,67		
4	Maluku 11,00	10	Sulawesi Barat 7,46	16	Jambi 5,42		
5	Maluku Utara 10,93	11	Nusa Tenggara Timur 7,16	17	Kalimantan Barat 5,30		
6	Bengkulu 10,05	12	Aceh 7,15	18	Sumatera Barat 5,23		
						20	Bangka Belitung 4,62
						26	DKI Jakarta 3,44
						21	Sumatera Utara 4,19
						27	DI. Yogyakarta 3,43
						22	Sumatera Selatan 4,11
						28	Nusa Tenggara Barat 3,41
						23	Kepulauan Riau 3,73
						24	Lampung 3,54
						25	Riau 3,49
						29	Bali 2,91
						30	Jawa Tengah 2,68
						31	Jawa Timur 2,53
						32	Jawa Barat 2,34
						33	Banten 2,03

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemkes RI, 2012

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada sejak tahun 2006 selalu mengalami kenaikan mulai dari 3,61 menjadi 3,89 di tahun 2012, kecuali tahun 2008. Sebanyak 28 provinsi mempunyai rasio puskesmas di atas 3 atau tiap satu Puskesmas melayani kurang dari 30.000 penduduk. Provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi khususnya di Pulau Jawa mempunyai rasio puskesmas relatif rendah karena jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti balai pengobatan, klinik, praktek dokter dan bidan swasta tersedia dalam jumlah yang mencukupi .

## RASIO BIDAN PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

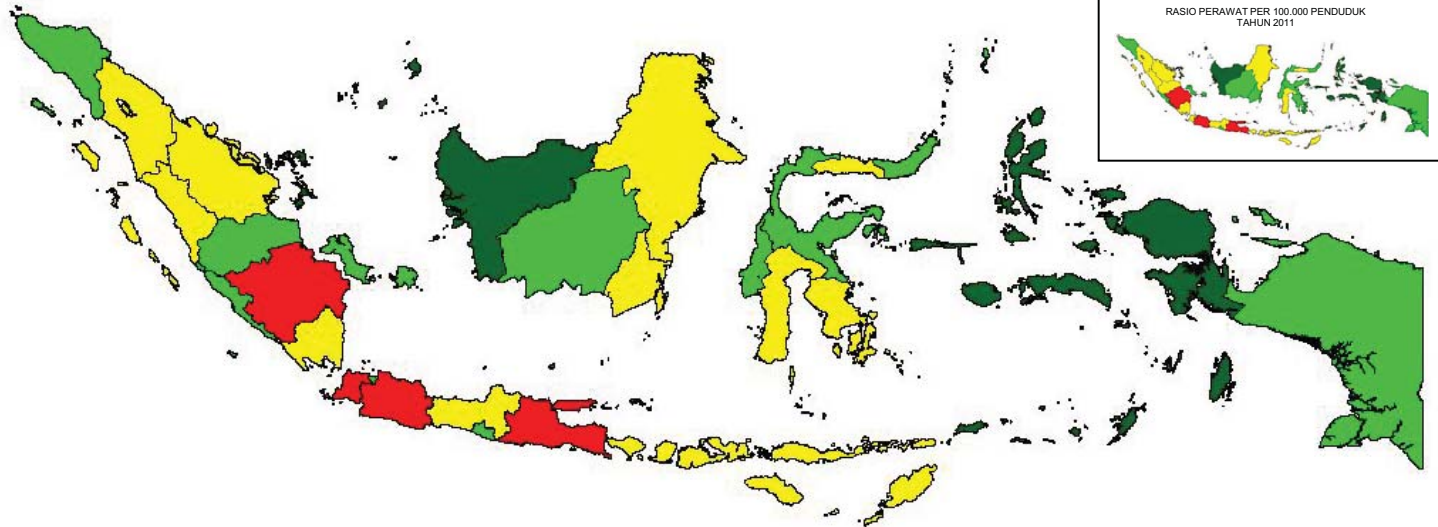


≥ 105		70 - 104,9		35 - 69,9		< 35					
1	Aceh 193,6	3	Sumatera Utara 98,9	11	Sulawesi Tenggara 71,9	14	Kep. Bangka Belitung 61,7	22	Sulawesi Selatan 53,7	30	Jawa Timur 33,5
2	Bengkulu 142,3	4	Jambi 95,6	12	Kalimantan Selatan 71,6	15	Riau 61,4	23	Kalimantan Barat 49,3	31	Banten 28,5
		5	Maluku Utara 95,6	13	Maluku 70,2	16	Kepulauan Riau 60,6	24	Sumatera Selatan 49,2	32	Jawa Barat 23,5
		6	Papua Barat 91,2			17	Gorontalo 59,4	25	Kalimantan Timur 48,4	33	DKI Jakarta 21,5
		7	Sumatera Barat 88,9			18	Sulawesi Utara 59,0	26	Jawa Tengah 47,3		
		8	Kalimantan Tengah 79,1			19	Bali 58,8	27	DI Yogyakarta 46,4		
		9	Sulawesi Tengah 77,7			20	Papua 57,0	28	Nusa Tenggara Barat 44,6		
		10	Sulawesi Barat 74,9			21	Nusa Tenggara Timur 55,3	29	Lampung 44,2		

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, 2013

Data rasio bidan dirasioikan dengan jumlah penduduk tahun 2012 (estimasi dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010) menunjukkan rasio bidan berkisar antara 21,5–193,6 bidan per 100.000 penduduk. Rasio dokter tertinggi dicapai di Provinsi Aceh dengan 193,6 dan terendah di Provinsi DKI Jakarta dengan rasio 21,5. Rasio bidan di Indonesia adalah 49,9 per 100.000 penduduk. Hasil ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia berada di atas rata-rata nasional.

## RASIO PERAWAT PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012

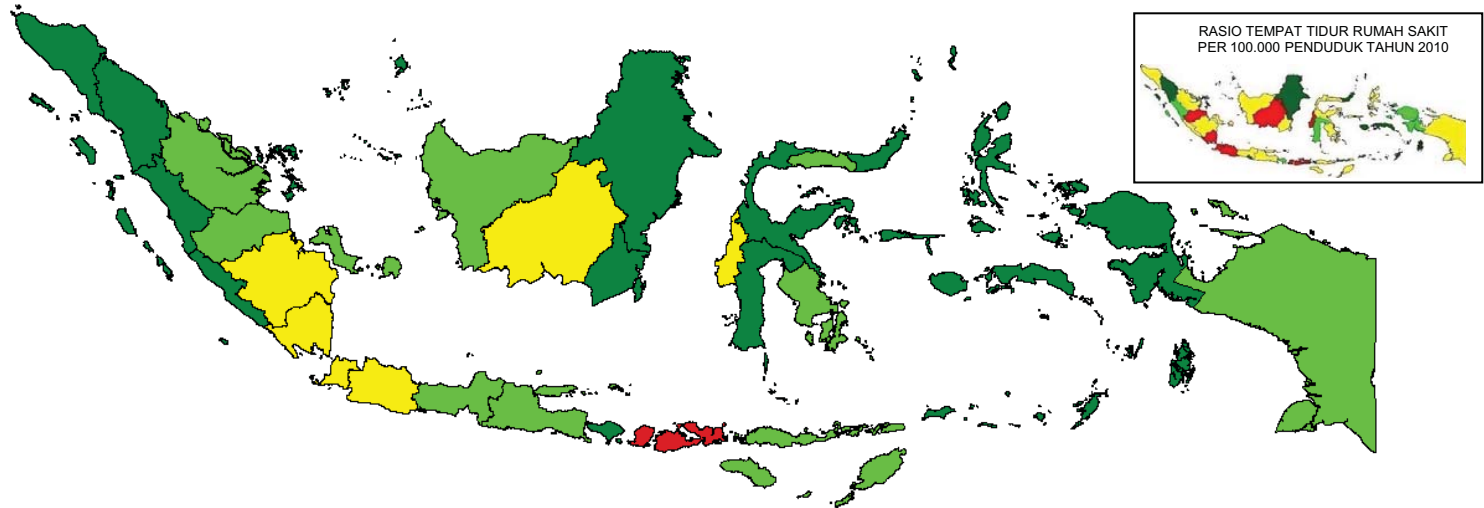


≥ 210		140 - 2109,9				70 - 139,9				< 70	
1 Maluku Utara	327,1	6 Sulawesi Tengah	200,6	13 Aceh	162,9	17 Sulawesi Tenggara	138,4	24 Nusa Tenggara Barat	95,8	30 Banten	56,2
2 Maluku	312,6	7 DKI Jakarta	198,7	14 Sulawesi Barat	156,4	18 Kalimantan Selatan	134,5	25 Sumatera Utara	95,1	31 Sumatera Selatan	56,1
3 Kalimantan Barat	243,2	8 Sulawesi Utara	198,6	15 DI Yogyakarta	146,8	19 Sumatera Barat	133,1	26 Nusa Tenggara Timur	84,6	32 Jawa Timur	49,8
4 Papua Barat	222,5	9 Papua	173,4	16 Jambi	141,9	20 Gorontalo	119,3	27 Riau	72,8	33 Jawa Barat	31,3
5 Kepulauan Riau	222,5	10 Kalimantan Tengah	171,9			21 Bali	117,4	28 Lampung	71,2		
		11 Bengkulu	171,2			22 Kalimantan Timur	114,9	29 Jawa Tengah	70,7		
		12 Kep. Bangka Belitung	163,9			23 Sulawesi Selatan	98,8				

Sumber: Badan PPSDM Kesehatan, 2013

Data rasio perawat dirasionkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 (estimasi dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010) menunjukkan rasio perawat yang mempunyai kisaran antara 31,3 – 327,1 perawat per 100.000 penduduk. Rasio dokter tertinggi dicapai di Provinsi Maluku Utara dengan 327,1 dan terendah di Provinsi Jawa Barat dengan rasio 31,3. Rasio perawat di Indonesia adalah 89,9 per 100.000 penduduk. Hasil ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia berada di atas rata-rata nasional.

# RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2012



> 100				75 - 100				50 - 75		< 50				
1	DI. Yogyakarta	290,11	7	Bali	129,68	13	Maluku Utara	109,75	27	Kalimantan Tengah	73,42	33	Nusa Tenggara Barat	49,27
2	DKI Jakarta	204,98	8	Kalimantan Timur	123,38	14	Kalimantan Selatan	104,08	28	Sumatera Selatan	71,54			
3	Sulawesi Utara	189,55	9	Sulawesi Selatan	123,28	15	Bengkulu	102,30	29	Jawa Barat	64,94			
4	Papua Barat	152,14	10	Aceh	114,95	16	Sulawesi Tengah	101,95	30	Sulawesi Barat	59,25			
5	Sumatera Utara	138,98	11	Sumatera Barat	113,69				31	Banten	58,48			
6	Maluku	135,72	12	Kepulauan Riau	111,40				32	Lampung	53,11			
17	Kalimantan Barat	98,20	23	Jambi	90,46									
18	Jawa Tengah	97,58	24	Jawa Timur	87,75									
19	Gorontalo	96,73	25	Sulawesi Tenggara	82,41									
20	Papua	92,79	26	Nusa Tenggara Timur	80,36									
21	Riau	91,79												
22	Bangka Belitung	91,16												

Sumber: Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemkes RI, 2012

Rasio tempat tidur rumah sakit (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus) per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 97,38. Hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rasionya masih di bawah 50.